

346.017

Sue

k 21

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA
SETELAH ORANG TUA BIOLOGISNYA
KAWIN SECARA SAH MENURUT
HUKUM ADAT BALI**

(Studi kasus di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Daerah Tingkat I Bali)

TESIS
Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2



Oleh:

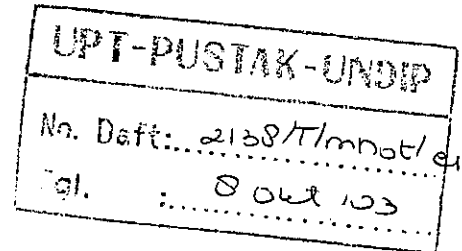
Ida Ayu Putu Suryatini, SH
B4B 000 143

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

UPT-PUSTAKA UNRI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA SETELAH ORANG TUA
BIOLOGISNYA KAWIN SECARA SAH MENURUT
HUKUM ADAT BALI**

(Studi kasus di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Daerah Tingkat I Bali)



Oleh:

Ida Ayu Putu Suryatini,SH
B4B 000 143

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28 Pebruari 2003
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I.G.N. Sugangga'.

Prof. I.G.N. Sugangga, SH.

KATA PENGANTAR.

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nyalah tesis ini dapat diselesaikan dengan baik

Penulis yakin, banyak hal hal yang masih bisa diperbuat yang menuntut pemikiran-pemikiran, ide-ide serta gagasan-gagasan yang berorientasi kedepan, selain persembahan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan syarat terakhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi S2 Magister Kenotariatan Universitas Dipenegoro. Adapun judul dari tesis ini adalah “ Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Secara Sah Menurut Hukum Adat Bali “ dengan melakukan studi kasus di Griya Abian Buruwan, Banjar Buruwan , Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Daerah Tingkat I Bali.

Banyak yang berjasa dalam penyelesaian tesis ini mulai dari tahap persiapan sampai berwujud seperti sekarang ini. Sebagai rasa penghargaan dari penulis, ijinilah dalam kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku ketua program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan

selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap penyelesaian tesis ini.

2. Bapak Suharto , SH, M Hum, sekretaris program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Ibu Hj. Sri sudaryatmi sebagai pengganti dari Alm. Ibu Irma Setyowati S, SH selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan serta bimbingan dalam penyelesaian studi di program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Semua staf pengajar/dosen dilingkungan program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan benih-benih ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya selama masa perkuliahan.
5. Semua staf pegawai pengajaran program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas bantuannya selama ini.
6. Bapak, ibu, adik-adik tercinta yang telah banyak memberikan perhatian, dorongan serta bantuan moril dan materiil yang tidak terhingga.
7. Alm. Ibu Rai Sutiti yang selama hidupnya telah banyak memberikan perhatian serta dukungannya .

8. Suami serta anak tercinta yang telah banyak memberikan perhatian , dorongan serta bantuan moril dan materiil sehingga terselesaikannya tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut dalam membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik untuk penyempurnaannya sangat penulis hargai, dan akan berguna pula bagi penyempurnaan karya-karya selanjutnya.

Tidaklah salah, penulis berharap bahwa tesis ini nanti dapat bermanfaat dalam proses belajar mengajar khususnya pada Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Semoga ada manfaat dan gunanya bagi kita sekalian.

Semarang, Nopember 2002

Penyusun

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Nopember 2002



IDA AYU PUTU SURYATINI, SH.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN-----	ii
KATA PENGANTAR -----	iii
PERNYATAAN-----	iv
DAFTAR ISI-----	v
ABSTRAKSI-----	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah -----	1
1.2. Rumusan Masalah -----	8
1.3. Tujuan Penulisan-----	8
1.4. Kegunaan Penulisan -----	9
1.5. Sistematika Penulisan -----	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Keturunan dan Anak Astra-----	11
2.2. Pengertian Mengenai Hukum Waris Adat -----	16
2.3. Unsur-Unsur Pewarisan-----	19
2.4. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris -----	27
 BAB III METODELOGI	
3.1. Bahan-Bahan/Materi Penelitian -----	36
3.2. Pendekatan Masalah-----	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data-----	49
3.4. Jalannya Penelitian -----	40
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data-----	41
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Tinjauan Umum-----	43
4.1.1. Letak Desa -----	43
4.1.2. Wilayah Desa -----	43
4.1.3. Penduduk -----	44
4.2. Posisi Kasus -----	45
4.3. Pembahasan-----	51
4.3.1. Pengertian Mengenai Anak Luar Kawin -----	51
4.3.2. Pengertian Mengenai Kasta Yang Ada di Masyarakat Hindu Bali -----	58
4.3.3. Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Hindu	

di Bali -----	62
4.3.4. Hak dan Kewajiban Anak Astra Setelah Orang Tuanya Kawin Sah Dalam Hukum Kekeluargaan Adat Bali -----	70
4.3.5. Kewajiban Orang Tua Biologis Anak Astra Terhadap Seorang Anak Astra -----	77
4.3.6. Hak dan Kewajiban Anak Astra di Kaji dari Aspek Waris Adat Bali -----	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan -----	86
5.2. Saran-Saran -----	88

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Pada masyarakat Hindu di Bali mengenal 2 (dua) macam istilah untuk menyebut anak luar kawin yaitu anak *bebinjat* dan anak *astra*, yang mana perbedaannya terletak pada diketahui atau tidaknya bapaknya dan masalah kasta.

Terhadap kelahiran anak *astra* itu sering terjadi pengakuan dan atau pengesahan oleh orang tuanya (bapak biologisnya). Dengan dilakukannya pengakuan dan pengesahan oleh bapak biologisnya terhadap anak *asira* tersebut, maka anak yang bersangkutan menjadi anak sah.

Namun tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi di Desa Adat Sanur, hal tersebut diatas tidak dimungkinkan terjadi, karena pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak *astra* berkaitan dengan masalah kasta walaupun kedua orang tua biologisnya hendak melangsungkan perkawinan secara sah, namun setelah diketahui oleh sesepuh adat Sanur ternyata usia kehamilan sang calon pengantin wanita sudah memasuki lebih dari lima bulan, maka kedua mempelai tersebut tidak dapat untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah jabang bayi lahir dengan status sebagai atau tetap dinamakan anak *astra* dan tidak diperkenankan untuk diakui dan disahkan sebagai anak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak *astra* tersebut dengan keluarga sedarah yaitu antara bapak dan ibunya yang telah kawin sah serta adik-adiknya yang terlahir kemudian. Dan hal ini juga pasti berpengaruh terhadap kedudukan anak *astra* tersebut dari sisi pewarisan.

Kedudukan Anak *Astra* yang orang tua biologisnya kawin sah tidak dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar bapak biologisnya, karena ia telah berada dalam kandungan ibunya lebih dari lima bulan pada saat akan dilangsungkannya upacara pengesahan perkawinan dari kedua orang tua biologisnya tersebut sehingga upacara perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, baru setelah anak *astra* itu lahir perkawinan antara kedua orang tua biologisnya dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Griya Abian Buruwan Sanur.

ABSTRACT

Ida Ayu Putu Suryatini, SH

In Balinese Hinduism society, there are two kinds of term to call an illegitimate child : as bebinjat child and astra child. The difference of the two terms lies on whether the father of the child is known or not and caste in society.

In every birth of an astra child, often occurs legitimation or avowal of the child by the parents (his / her biological father). As the process of legitimation and avowal is done by his / her biological father toward the astra child, the status of this astra child is becoming legitimate child.

However, what happens in the tradition village of Sanur is the opposite. The case mentioned above is impossible to happen. It is caused by the process of legitimizing an astra child has strong connection with caste in society, even though the parents want to get married legally. But when the period of pregnancy of the bride-to-be is known more than five months, the couple cannot carry out the wedding. They can held a wedding ceremony after the baby is delivered. But even so, the baby is still called an astra child and is forbidden to be legitimated and avowed as legitimized child. So, there is not any relationship of family law between the astra child and its own blood relatives; his/her mother and father who have already married legally and his/her siblings born later. Obviously, this matter will influence the position of an astra child towards heritance matter.

The position of an astra child whose biological parents has already married, is that he/she can not be accepted as the part of the big family of his/her own biological father, since the baby has already in the mother's womb for more than five months, when if is going to be performed the legalization of wedding, but still the wedding can not be done. It can be done after the astra child born, this matter is in accordance with the rule of Griya Abian Buruwan Sanur.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama dalam masyarakat. Menurut Aristoteles adalah *Zoon Politicon*, yaitu mahluk sosial yang menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama daripada hidup sendiri.¹

Hidup bersama bila terjadi pada insan yang berlainan jenis serta telah memenuhi persyaratan suatu perkawinan, mereka sudah dapat disebut dengan pasangan suami istri. Pengertian dari suatu perkawinan tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah adanya anak sebagai penerus keturunan. Anak yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, beribu pada wanita yang melahirkannya dan berapak

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982. Hal. 9. (selanjutnya di sebut Soerojo Wignjodipoero I)

pada suami wanita itu. Hal ini merupakan kejadian yang normal. Tapi pada kenyataannya tidak semua kejadian itu berjalan normal. Dalam kehidupan nyata suatu masyarakat, ditemukan adanya kejadian-kejadian di luar keadaan seperti adanya anak-anak yang lahir dari wanita yang belum berada di dalam ikatan perkawinan yang sah.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini ada disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Di Bali upacara perkawinan bila diamati terdapat 3 tahapan upacara, yaitu :

- a. Upacara pendahuluan : untuk dapatnya mempelai yang bersangkutan sekedar dihilangkan “*sebel kandelnya*” hingga wajar untuk dilanjutkan upacara lainnya.
- b. Upacara pokok : merupakan upacara “*pemupul*” baik secara adat, agama maupun kemasyarakatan, dengan mana kesuciannya dan kesahannya tidak diragukan, walau misalnya upacara lanjutannya tersebut di bawah (c) tidak diadakan lagi.

- c. Upacara lanjutannya : merupakan upacara yang secara keagamaan bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesucian, atau meningkatkan nilai kesusilaan hubungan perbesanan.³

Namun bila anak telah lahir sebelum upacara perkawinan diselenggarakan, maka anak tersebut dinamakan anak luar kawin. Ketentuan mengenai anak antara lain diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”

Sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Artinya si anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak termasuk hak warisnya terhadap keluarga ibu, ia hanya berhak atas warisan yang dimiliki oleh ibunya saja.

³ Kaler, I Gst. Ketut, Cudami Perkawinan / Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali, Percetakan Bali (Offset), TT, hal 16

Apabila seorang anak dilahirkan sebelum dilaksanakan suatu upacara perkawinan, maka menurut Hukum Adat di Bali dinamakan anak luar kawin, dimana istilah anak luar kawin disebutkan ada dua, yaitu anak *berbinjat* dan anak *astra*.

Perbedaan anak *bebinjat* dan anak *astra* ini adalah :

- a. Anak *bebinjat* : anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui bapaknya.
- b. Anak *astra* : anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkan lebih tinggi daripada kasta ibunya. Dalam hal ini bapak anak ini diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan sah.⁴

Andaikata seorang gadis setelah hamil lebih dulu sebelum perkawinan dilangsungkan, maka dalam hal ini perkawinan dapat saja terus dilangsungkan asal saja si laki-laki mengetahui hal itu. Anak yang lahir nantinya adalah anak sah.⁵

Dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana kedudukan pihak bapak (laki-laki) lebih mempunyai fungsi dibanding pihak wanita (ibu), maka kedudukan hukum dari seorang anak *astra* yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah

⁴ . Soeripto, K.M.R.H , *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, UNEJ, Jember, 1973, h. 33.

⁵ Ibid, hal. 30

adalah sama dengan seorang anak sah dalam hubungannya dengan ibunya atau terhadap keluarga ibunya.⁶

Tetapi pada masa sekarang, seperti yang diungkapkan oleh N. Sukerti dalam laporan penelitiannya di daerah tingkat II Tabanan, Propinsi Bali bahwa terhadap kelahiran anak *astra* itu sering terjadi pengakuan dan atau pengesahan oleh orang tuanya (Bapak biologisnya). Dengan dilakukannya pengakuan dan pengesahan oleh Bapak biologisnya terhadap anak *astra* tersebut, maka anak yang bersangkutan menjadi anak sah. Menurut hukum adat dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak *astra* tersebut, maka sejak disahkannya maka yang bersangkutan telah menimbulkan hubungan hukum dengan bapaknya.⁷

Namun tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi di Desa Adat Sanur, hal tersebut diatas tidak dimungkinkan terjadi, karena pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak *astra* berkaitan dengan masalah kasta walaupun kedua orang tua biologisnya hendak melangsungkan perkawinan secara sah, namun setelah diketahui oleh sesepuh adat di Desa Sanur ternyata usia kehamilan sang calon pengantin wanita sudah memasuki lebih dari lima bulan, maka kedua mempelai tersebut tidak diperbolehkan untuk melangsungkan

⁶ Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Edisi II, Tarsito, Bandung, 1984, h. 14.

⁷ N. Sukerti, "Kedudukan Anak Luar Kawin", Kertha Patrika Nomor 51 Tahun XVI, 1990, h. 45

perkawinan dan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah si jabang bayi lahir dengan status sebagai atau tetap dinamakan anak *astra* dan tidak diperkenankan untuk diakui dan disahkan sebagai anak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak *astra* tersebut dengan keluarga sedarah yaitu antara si anak *Astra* dengan ayah dan ibunya yang telah kawin sah dan adik-adik yang terlahir kemudian. Dan hal ini juga akan berpengaruh jelas terhadap kedudukan anak *astra* tersebut dari sisi pewarisan.

Harta warisan menurut agama Hindu, sebelumnya perlu diingat bahwa bagi masyarakat di Pulau Bali dan Pulau Lombok yang beragama Hindu, dewasa ini tidak saja terdapat di Bali dan Lombok, tetapi juga diberbagai daerah transmigrasi Bali seperti Lampung dan lain-lain. Oleh karena bagi Masyarakat Bali yang beragama Hindu hukum warisnya merupakan refleksi dari agama Hindu yang dianutnya , maka sulit untuk membedakan mana yang menurut agama Hindu dan yang mana menurut adat.⁸

Dalam ajaran yang umum yang diutamakan dalam pewarisan adalah penarikan menurut garis lelaki saja (patrilineal), yang dalam hukum kekeluargaan Hindu sering disebut sebagai *kapurusan*, yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan dengan

⁸ Hilman Hadikusuma.H. "Hukum Waris Indonesia menurut : Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam", Pt Cita Aditya Bakti, Bandung 1996, h. 45.

saudara-saudaranya yang wanita. Penting selaku pemikul dharma (kewajiban) menunaikan *pitra puja* yaitu pemujaan dan tanggungjawab kepada leluhur, yang diiringi dengan hak mendapat harta warisan, mempergunakan dan mengemong/menjaga barang-barang pusaka. Namun terdapat hal yang lain sebagai upaya untuk melanjutkan kelangsungan keturunan mereka yaitu di beberapa daerah di Bali, dimana pasangan suami istri yang hanya mempunyai anak wanita lebih-lebih bila hanya seorang putri tunggal, yaitu mengusahakan membuat "*sentana rajeg*".⁹ yaitu pengantin wanita yang menarik suaminya keluar dari ikatan purusa ayah bunda dan saudara-saudaranya. Dengan demikian secara keagamaan dan hukum, si istrilah yang berkedudukan sebagai *purusa*, serta sang suami sebagai *pradana* dalam perkawinan tersebut. Tujuan utamanya adalah anak wanita memperoleh kedudukan sebagai *sentana purusa* yaitu sebagai anak pelanjut keturunan dalam lingkungan keluarganya.

Perlu kiranya diadakan suatu penelitian mengenai kedudukan hukum anak *astra* dalam hukum adat Bali. Kedudukan hukum yang dimaksud yaitu kedudukan hukum anak *astra* dalam hubungannya dengan orang tuanya, saudara-saudaranya yang terlahir setelah adanya perkawinan yang sah dari kedua orang tua biologisnya, serta kerabat-

⁹ Kaler I Gusti Ketut, "Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali Bagian 2", Bali Agung, Cet.I, 1982, h. 138.

kerabatnya yang lain. Terhadap permasalahan pewarisan juga harus mendapat perhatian, sehingga diketahui kedudukan anak *astra* tersebut dalam pewarisan

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak *astra* dalam hukum kekeluargaan di Bali setelah orang tua biologisnya kawin sah ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum anak *astra* dalam hukum waris adat Bali setelah orang tua biologisnya kawin sah ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan anak *astra* dengan kedua orang tua biologisnya yang telah kawin sah, hubungan anak *astra* dengan saudara-saudara dan kerabatnya.

2. Untuk mengetahui kedudukan anak *astra* yang kedua orang tua biologisnya yang telah kawin sah terhadap harta warisan dari orang tuanya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah pengetahuan di bidang hukum waris dan hukum kekeluargaan adat Bali khususnya mengenai kedudukan anak *astra* setelah kedua orang tua biologisnya kawin sah ditinjau dari bidang hukum kekeluargaan dan hukum waris adat Bali.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini diawali dengan:

Bab I sebagai Pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis secara keseluruhanya.

Selanjutnya Bab II akan membahas mengenai Kedudukan hukum anak *astra* yang orang tuanya kawin sah menurut Hukum Adat Bali khususnya dalam hukum kekeluargaan dan waris, dan mengenai pengakuan dan pengesahan seorang anak *astra* agar dapat menjadi anak sah sebab hal ini sangatlah penting dalam hal hubungan anak tersebut dengan hukum kekeluargaan dan hukum waris adat yang berlaku di Bali.

Bab III metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, undang-undang/peraturan, serta metode dan analisa data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yaitu meliputi contoh kasus serta penyelesaiannya.

Bab V merupakan penutup yang akan memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Keturunan dan Anak Astra.

Sudah merupakan kodrat alam bahwa manusia harus hidup bersama-sama dengan manusia lain , harus hidup didalam suatu pergaulan dengan manusia lain, hubungan mana dimulai sejak manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal dunia. Guna tertib dan terselenggaranya kepentingan-kepentingan didalam kehidupan masyarakat itu maka masing-masing anggota masyarakat membatasi sikap, tingkah laku dan perbuatannya. Batasan-batasan tersebut diwujudkan dalam suatu aturan⁹.

Aturan dalam masyarakat sangatlah berkaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain agama yang dianut oleh masyarakat sangat berpengaruh didalam pembentukan suatu aturan hukum yang akan berlaku

Demikian pula menurut T.I.P Astiti dalam laporan penelitiannya menyebutkan bahwa di Bali pada khususnya masyarakat yang beragama Hindu, dalam bidang hukum perkawinan, hukum keluarga dan hukum waris adalah mendekati pada soal-soal kepribadian dan kerohanian .¹⁰

⁹ Derana, Cokorde Raka, "Persekutuan Hukum Adat Dan Fungsinya Bagi Hukum Adat Pada Masa Sekarang", Kertha Patrika, VII-VIII, 1977, h.16.

¹⁰ Astiti, T.I.P "Unsur-Unsur Agama Yang Diterima Sebagai Hukum Adat Yang Hidup di Bali", Laporan Penelitian, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1983, h. 57.

Seperti halnya untuk menentukan sah tidaknya status hukum seorang anak tidak dapat dilepaskan dari sah tidaknya perkawinan kedua orang tuanya, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pasal 2 menyebutkan bahwa :

Ayat 1:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ayat 2:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”

Dari kedua ketentuan diatas dapat diketahui bahwa sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agama dan kepercayaannya dan tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaannya itu begitu juga secara administrasi. Walaupun pada pasal 2 ayat 2 ini ada yang berbeda pendapat, disatu pihak ada yang menyatakan bahwa antara ayat 1 dan 2 saling terkait, dan dipihak lain ada yang berpendapat bahwa antara ayat 1 dan ayat 2 adalah terpisah karena dianggap ayat 2 hanyalah bersifat administratif saja.

Seperti kita ketahui setiap keluarga memberi arti dan kedudukan yang penting terhadap keberadaan seorang anak. Hal ini disebabkan karena

anak dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan dipandang sebagai tumpuan harapan orang tuanya yang pada kemudian hari wajib ditumpahkan. Disamping itu anak juga dianggap sebagai pelindung orang tuanya apabila orang tuanya sudah dianggap tidak mampu lagi untuk menghidupi dirinya sendiri beserta sanak keluarganya. Anak merupakan penerus keturunan, maksudnya adalah bahwa keberadaan anak dalam suatu keluarga mempunyai fungsi meneruskan generasi dari keluarganya sehingga keluarganya tersebut tidak punah.

Pengertian keturunan adalah ketunggalan leluhur yang artinya :

“Ada perhubungan darah antara orang seorang dan orang yang lain.

Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang darah yang lain”¹¹

Individu sebagai penerus keturunan atau anggota keluarga mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan keluarga bersangkutan, seperti boleh menggunakan nama keluarga, boleh dan berhak atas bagian dari harta kekayaan keluarganya, wajib salingelihara memelihara dan saling bantu membantu, serta dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak pihak ketiga.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa keturunan adalah orang-orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai hubungan darah antara orang

¹¹ Sorojo Wigjodipuro, "Pengantar Asas-Asas Hukum Adat", PT Toko Buku Gunung Agung, 1995, h. 108.

yang seorang dengan orang yang lain yang menurunkannya, apabila keturunan itu dibatasi pengertiannya dalam arti anak maka didalam masyarakat dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai kedudukan seorang anak yaitu dalam pasal 42 menentukan bahwa :

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Artinya apabila perkawinan dari orang tuanya sudah memenuhi pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan yaitu telah sah menurut hukum agama dan kepercayaannya itu maka perkawinan itu sudah dianggap sah dan selanjutnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu mempunyai kedudukan hukum yang sah pula, sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jadi dari kedua pasal tersebut dapat diketahui adanya anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan tanpa penjelasan, keterangan ataupun klausula apakah anak tersebut belum ada atau sudah ada dalam kandungan pada waktu upacara pengesahan perkawinan dari kedua orang tuanya, yang pokok upacara pengesahan perkawinann dari kedua orang tuanya dilakukan dan lahir anak

maka anak tersebut adalah anak sah. Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari orang yang tidak pernah kawin sah sehingga kedudukan hukumnya hanya pada ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan yang menyangkut warisan anak tersebut hanya mempunyai hak waris dari ibunya saja.

Di Bali dikenal ada 2 (dua) istilah untuk menyebut anak luar kawin yaitu anak *bebinjat* dan anak *astra*.

- a. Anak *bebinjat* adalah anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak siapa diketahui bapaknya. Jadi jelaslah bahwa anak *bebinjat* sama sekali tidak mempunyai bapak, karena tidak seorang laki-laki pun yang mau mengakui anak itu sebagai anaknya.
- b. Anak *astra* adalah anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkannya lebih tinggi dari kasta ibunya. Dalam hal ini, bapak dari anak tersebut diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan secara sah.¹²

Mengenai pengertian anak *astra* ini terdapat juga dalam kamus Bahasa Bali yang disusun oleh J. Kresten, disebutkan bahwa anak *astra* adalah anak seorang bangsawan dengan seorang wanita biasa dari hubungan yang tidak disahkan.

¹² Soeripto. K.R.M.H." Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali", UNEJ, Jember. 1973, h.33.

Maka jelaslah mengenai pengertian anak *astra* tersebut, dan diketahui bahwa pengertian anak *astra* dan anak *bebinjat* mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil, yaitu :

Dalam pengertian anak *bebinjat* si anak tidak diketahui siapa bapaknya sedangkan dalam pengertian anak *astra* adalah anak yang terlahir diketahui siapa bapaknya tetapi kedua orang tua biologisnya tersebut belum terikat dalam perkawinan yang sah, serta adanya perbedaan kasta dimana bapaknya berasal dari golongan *Tri Wangsa* (Bangsawan), dan ibunya dari golongan *Sudra* (rakyat biasa).

Macam-macam anak seperti disebutkan diatas sebenarnya adalah untuk membedakan status anak *astra* dalam hukum keluarga dan hukum waris, kedudukan serta fungsi anak *astra* dari sanak familinya. Dengan diketahuinya status anak itu , maka akan diketahui pula status sosial anak tersebut baik dalam hukum terutama dalam hukum kekeluargaan dan hal tersebut terkait pula dengan masalah pewarisan.

2.2. Pengertian Mengenai Hukum Waris Adat

Dalam bukunya Soeripto menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan

mengoperkan barang-barang, harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya.¹³

Jadi pewarisan menurut hukum adat adalah suatu proses penerusan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum adat menurut Ter Haar mengartikan dan merumuskan pengertian hukum waris adat adalah sebagai peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan menurut Soepomo bahwa hukum adat waris menunjukkan corak –corak yang memang “typeran” bagi aliran pikiran tradisional Indonesia (Bab-Bab Hukum Adat, h.67), selanjutnya dikatakan bahwa Hukum waris adat bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran kommunal dan kongkrit dari Bangsa Indonesia.

Juga disampaikan pengertian Hukum Waris Adat Patrilineal adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses-proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, dimana proses tersebut terjadi pada masyarakat hukum yang bersistem keturunan garis kebakakan.

¹³ Soeripto, K.R.M.H, op.cit. h.43.

Disini terlihat bahwa ciri-ciri dari hukum waris adat Patrilineal pada umumnya tidaklah berbeda dengan ciri-ciri hukum waris adat pada umumnya antara lain :

- a. Sifat kebersamaan yang kuat (ikatan kebapaan yang kuat), artinya tiap pribadi merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatannya patrilineal yang erat, dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diserasikan dengan kepentingan umum atau masyarakat.
- b. Adanya unsur magis-relegius yang berpengaruh pada pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
- c. Cara berpikir yang kongkrit, yaitu alam pikiran yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki, atau yang akan dikerjakan diberi wujud suatu benda, walaupun fungsinya hanya sebagai lambang belaka.
- d. Sifat fisual artinya bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau ucapan, maka suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah tindakan itu tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat.

Dari rumusan-rumusan yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris itu adalah hukum yang mengatur

mengenai peralihan atau penerusan harta warisan dengan segala akibat dari peninggalan si pewaris. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa untuk adanya pewarisan maka harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : harus adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.

2.3. Unsur-Unsur Pewarisan

Sebagaimana telah dikemukakan diatas , pada pokoknya harus ada 3 (tiga) unsur untuk dapat terlaksananya pewarisan yaitu sebagai berikut : adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.

a. Pewaris

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan tersebut akan diteruskan pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Dalam membicarakan masalah pewaris dalam hukum adat harus melihat susunan kekerabatan yang mempengaruhinya dimana dalam masyarakat Indonesia dikenal ada 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu :

1. Sistem kekeluargaan Patrilineal, yaitu suatu sistim keturunan yang ditarik menurut garis bapak, oleh karena itu kedudukan anak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan anak perempuan.
2. Sistim kekeluargaan Matrilineal yaitu suatu sistim kekeluargaan yang ditarik menurut garis ibu, dalam sistim keturunan ini

kedudukan anak perempuan lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki.

3. Sistem kekeluargaan Parental yaitu suatu sistem keturunan yang ditarik dari dua sisi yaitu dari garis bapak dan ibu. Dalam sistem kekeluargaan ini tidak dibedakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.

Di Bali yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Hindu, berlaku susunan kekerabatan patrilineal dimana yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah kaum pria atau ayah.

Berdasarkan Kitab Menawa Dharmasastra IX ; 104-105, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pewaris dalam Agama Hindu adalah ayah dan/atau ibu atau saudara lelaki tertua.¹⁴

Jadi pada dasarnya menurut agama Hindu hanya pria sebagai pewaris dan ahli waris, tapi ada kemungkinan juga pewaris wanita misalnya *sentana rajeg*, janda yang wafat tanpa keturunan tapi ia sudah memiliki anak angkat, maka atas harta peninggalannya ia menjadi pewaris bagi anak angkatnya itu, atau juga sorang ibu akan menjadi pewaris bagi anaknya yang terjadi diluar perkawinan yang sah.

b. Ahli waris

¹⁴ Hadikusuma Hilman, "Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.31.

Dalam pewarisan maka unsur ahli waris merupakan salah satu unsur yang harus ada, artinya jika tidak ada orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris, maka tidak mungkin terjadi pewarisan, oleh karena itu unsur ahli waris merupakan unsur yang penting untuk terjadinya pewarisan, dan disamping itu unsur ahli waris ini juga sekaligus merupakan subjek dari hukum waris itu sendiri.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam pewarisan yang menjadi ahli waris adalah angkatan atau generasi yang lain dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu yang dapat menjadi ahli waris adalah anggota keluarga yang lain terutama anak-anak dari pewaris. Dalam arti kata jika masih ada anak-anak, maka orang lain sebagai anggota keluarga tidak bisa menjadi ahli waris, jadi apabila si pewaris meninggal dunia, dan ia meninggalkan anak-anak maka anggota keluarga yang lainnya menjadi tertutup haknya untuk dapat menjadi ahli waris.

Dalam hukum adat yang menjadi ahli waris utama adalah anak-anak atau keturunan dari si pewaris, tapi dapat tidaknya anak-anak pewaris menjadi ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan adalah tergantung dari sistem kekeluargaan yang berlaku bagi pewaris dan ahli waris itu sendiri.

Dalam masyarakat hukum adat di Bali adalah menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih dominan

dibandingkan kedudukan wanitanya. Dalam hal ini yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak wanita yang kawin akan masuk pada keluarga suaminya, sehingga putuslah hubungan hukum antara anak wanita yang telah kawin tersebut dengan orang tuanya, dengan putusnya hubungan hukum itulah yang menyebabkan anak wanita yang telah kawin keluar tidak berhak lagi menjadi ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Namun biasanya anak wanita tersebut diberikan bekal yang disebut dengan *jiwa dana* pada saat *mejauman*, yaitu pada saat si pengantin wanita diarak pulang kerumah asalnya untuk pamitan dari *pemerajan* (tempat Suci) dan pamitan pada orang tuanya.

Apabila anak wanita tidak melakukan perkawinan sampai akhir ayatnya, maka ia berhak untuk menikmati harta warisan dari orang tuanya tersebut tetapi ia bukan sebagai ahli waris.

Seorang anak wanita baru berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya apabila ia ditetapkan sebagai *sentana rajeg*. *Sentana Rajeg* adalah anak wanita selaku *sentana* biasanya berstatus tidak kuat, dengan dan melalui perkawinan *nyeburin* (dimana si suami mengikuti garis keluarga si istri) selaku *rajegnya*, dijadikan *sentana* yang kokoh selaku *purusa*. Singkatnya *sentana* yang lemah diberi *rajeg* supaya kokoh.¹⁵

¹⁵ Kaler, I Gusti ketut, Butir-butir tercecet tentang adat bali 2, Bali Agung, 1982, hal 137.

Jadi dapat dikatakan dalam masyarakat bali yang mayoritas beragama hindu yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang berstatus sebagai ahli waris adalah keturunan yang laki-laki atau anak wanita yang berstatus sebagai laki-laki.

c. Harta Warisan

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda tersebut sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.¹⁶ Jadi apabila yang dibicarakan tentang harta peninggalan, maka itu berarti mempersoalkan harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan (dapat) dibagi, atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.

Pengertian “ dibagi “ pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya, dan suatu kepemilikan atas harta warisan tidak berarti kepemilikan atas harta warisan tidak berarti kepemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena itu menurut hukum adat suatu kepemilikan atas harta peninggalan masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

Wirjono Projodikoro menyatakan, bahwa:

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum waris adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 35

Tiap-tiap masyarakat didunia mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan , dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruh pada kekayaan alam masyarakat itu.¹⁷

Terjadinya hak milik salah satunya terjadi dari proses pewarisan, hal ini disebutkan dalam Menawadharma Sastra X. 115:

Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik, yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah, persahabatan, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan atau menerima hadiah dari orang yang soleh.

Hak atas harta warisan yang dapat diperoleh dalam cara pewarisan menurut sistem agama hindu tidak bersifat otomatis dan terjadinya warisan itu hanya dilakukan sekali saja dalam arti para ahli waris membagi harta warisan mendapat bagiannya hanya satu kali, maksudnya adalah apabila seorang ahli waris menuntut haknya pada saat si pewaris masih hidup atau sebelum diadakan pembagian warisan. Setelah pewaris meninggal dia tidak akan memperoleh bagian lagi karena pembagian itu hanya sekali saja.

Jadi ada pembatasan berlakunya acara pembagian waris menurut agama hindu. Pembatasan itu dapat berupa pembatasan hukum dan dapat juga terjadi dalam bentuk harta benda yang akan terjadi jelas kalau diteliti

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum waris di Indonesia, cetakan IV, sumur, Bandung, 1980, h. 9.

bahwa tidak semua harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan dalam berbagai waris.

Dalam kenyataannya tidak semua harta kekayaan merupakan harta warisan, karena ada pula harta kekayaan yang menurut sifatnya tidak boleh dibagi-bagi, seperti:

- a. Harta Pusaka
 - b. Harta *Guna kaya*
 - c. Harta *jiwa dana*
 - d. Harta *Dhana dharma*
- a. Harta pusaka sering disebut dengan *druwe tengah* (harta bersama), yaitu harta yang berasal dari warisan turun temurun yang tidak boleh dibagi-bagikan karena bersifat religio magis.
 - b. Harta *guna kaya* merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam perkawinan yang diperolehnya sebelum perkawinan, termasuk juga dalam hal ini berupa hadiah-hadiah dalam perkawinan.
 - c. Harta *jiwa dana* adalah pemberian dengan tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya, pemberian mana bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya . Jiwa dana dapat dibawa apabila anaknya tersebut memasuki jenjang perkawinan.

- d. Harta *dhana dharma* adalah harta yang telah didermakan untuk kepentingan-kepentingan *dharma* atau keagamaan.

Disamping harta-harta diatas, harta kekayaan keluarga menurut hukum adat dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Segi positif maksudnya adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, dan segi negatif maksudnya adalah hutang-hutang dari si pewaris. Itu artinya terhadap kekayaan pewaris, pertama-tama yang dilakukan adalah melunasi hutang-hutang dari si pewaris kemudian untuk melaksanakan upacara *pengabenan* (kremasi) terhadap jenazah si pewaris, baru sisanya dibagi berdasarkan atas kerukunan, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat berdasarkan atas persamaan hak. Namun apabila ternyata kekayaan positif tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang dari si pewaris, maka dalam hal ini merupakan tanggung jawab ahli warisnya.

Hal ini ada disebutkan dalam paswara tahun 1900 pasal 1, bahwa:

Bilamana ada orang hindu bali meninggal dunia, dan ada harta bendanya, atau ada hutang, pertama-tama harta benda itu dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya kemudian jika ada sisanya dipakai untuk mengabenkan jenazahnya.¹⁸

Seperti yang telah disinggung diatas dengan adanya sifat kekeluargaan yang patrilineal di Bali, maka disini jalur laki-laki sangatlah

¹⁸ Soeripto, K.R.M.H, op.cit, h.101

menentukan. Demikian juga halnya dalam pewarisan, anak laki-laki (keturunan laki-laki) yang lahir dari perkawinan yang sah pada prinsipnya menjadi ahli waris terhadap orang tuanya (termasuk anak angkat laki-laki dan *sentana rajeg*).

2.4. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris

Seorang ahli waris harus sudah ada pada saat pewarisan itu dilaksanakan. Pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah para warga yang paling karib didalam generasi berikutnya, yaitu anak-anak yang didasarkan didalam atau derajat si pewaris , yang pertama-tama mewaris adalah anak-anak kandung.¹⁹

Seorang anak laki-laki akan kehilangan haknya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, apabila:

1. Ia diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain.
2. Dalam hal anak laki-laki yang *kawin nyeburin*.
3. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan *dharmaning anak*, misalnya: a. durhaka terhadap leluhur
b. durhaka terhadap orang tua.²⁰

Seorang anak yang meninggalkan agama hindu di Bali juga menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris, sebab meninggalkan

¹⁹ Imam Sudiat, Hukum adat sketsa asas, cetakan II, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 162

²⁰ Soeripto, K.R.M.H, Op.Cit, h. 53

agama hindu dianggap meninggalkan hak dan kewajiban yang baik dalam kerabat dalam arti luas (*dadya*) maupun dalam arti sempit (terhadap orang tua kandungnya sendiri)²¹

Sedangkan menurut V.E Korn, seorang ahli waris terputus haknya menerima warisan antara lain disebabkan oleh:

1. Anak laki-laki yang kawin nyeburin .
2. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan *dharmaning anak*, misalnya:
 - a. Durhaka (*drowaka*) terhadap leluhur.
 - b. Durhaka (*drowaka*) terhadap orang tua.
3. *Sentana rajeg* yang kawin keluar.²²

Apabila ditelusuri lebih jauh, keberadaan ahli waris keutamaan , yaitu:

1. Kelompok Utama.

Ahli waris kelompok utama yaitu keturunan (anak) dari si pewaris.

Didalam pewarisan kelompok utama sering dijumpai pergantian tempat ahli waris, diistilahkan dengan *bij Plaatvervulling*.²³

²¹ Soeripto, K.M.R.H, Op.Cit, h. 54

²² Korn, V.E, Hukum adat waris di Bali, Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1972, h. 45

²³ Soebekti, R , Pokok-pokok Hukum perdata barat, Cetakan XVII, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, h. 98

Pergantian tempat bisa terjadi apabila seorang ahli waris meninggal sebelum dilakukan pembagian warisan, maka kedudukannya sebagai ahli waris diganti oleh keturunannya, dan hal semacam ini tidak mengenal batas-batas tertentu. Keturunan tersebut bersama-sama mendapatkan harta warisan dalam jumlah yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.

Dalam sistem kekeluargaan patrilenial, wanita bukanlah merupakan ahli waris, hal ini disebabkan karena dalam sistem patrilenial seorang wanita yang sudah kawin keluar akan lepas hubungannya secara hukum dengan keluarga dan orang tuanya. Dan sejak perkawinannya itu dilaksanakan maka ia sudah masuk ke dalam keluarga suaminya dan akibatnya anak wanita tersebut tidak akan mungkin dibebani dengan kewajiban-kewajiban keluarganya.

Mengenai kelompok utama dalam hal ini, anak yang berhak mewaris adalah:

1. Anak sah (anak kandung)
 2. Anak angkat
 3. Anak tiri
 4. Anak perempuan yang statusnya diangkat sebagai *sentana rajeg*.
2. Kelompok yang kedua

Ahli waris kelompok kedua ini terjadi apabila pewaris tidak memiliki keturunan (anak) dan tidak mengangkat anak. Mengingat di Bali

sistem kekeluargaan yang dianut adalah sistem patrilineal, maka yang termasuk ahli waris kelompok dua adalah orang tua yang *kepurusa*. Jadi yang berhak mewaris adalah ayah dari si pewaris, sedangkan ibunya menurut hukum adat tidak dapat mewaris tetapi bagi dia tidak ada larangan untuk menikmati bagian warisan yang diperoleh suaminya. Pada hakekatnya kedudukan janda sama dengan anak-anak perempuan yang tidak pernah kawin, yaitu sama-sama punya hak untuk menikmati harta warisan tersebut tetapi mereka bukanlah seorang ahli waris yang sah menurut hukum adat yang berlaku.

3. Kelompok yang ketiga.

Yang termasuk ahli waris kelompok ketiga dalam hukum adat adalah saudara-saudara dari si pewaris. Kelompok ketiga ini muncul apabila kelompok kedua seperti yang diuraikan diatas tidak ada sama sekali.

Hal ini dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, yang menyatakan:

Kalau si peninggal waris tidak mempunyai anak atau cucu serta keturunan kebawah, maka orang tuanya tampil kedepan sebagai ahli waris. Sedangkan kalau orang tuanya sudah wafat terlebih dahulu maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudaranya yang sekandung.²⁴

²⁴ Soerojo Wignjodipuro, Op.cit h.165

Namun apabila saudara sekandungnya itu perempuan yang telah kawin keluar atau saudara perempuannya itu telah pindah dari agama hindu, maka saudara perempuannya itu dianggap telah putus hubungan kekeluargaannya dengan orang tuanya, sehingga tidak ada hubungan saling mewaris dengan orang tuanya sebab ia sudah dianggap masuk kedalam keluarga yang lain.

4. Kelompok yang keempat.

Kelompok keempat atau kelompok terakhir ini terjadi apabila kelompok keutamaan, kelompok kedua, dan kelompok ketiga tidak ada. Yang termasuk ke dalam kelompok keempat ini adalah keluarga besar dari pewaris. Di Bali kelompok keempat ini biasa disebut dengan *dadya*. Dalam pewarisan ini timbul pewarisan yang bersifat kolektif, dimana semua harta warisan menjadi milik *dadya* bersama-sama dengan diurus oleh ketua *dadya*.

Pada umumnya di Bali mengenai kelompok ketiga dan kelompok keempat hampir tidak pernah terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat Bali mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, baik itu mengangkat anak perempuan sebagai *sentana rajeg* atau mengangkat anak laki-laki dari orang lain yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang disebut dengan istilah *sentana peperasan*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa susunan kekeluargaan di Bali adalah patrilineal yang pada pokoknya bersumber pada Agama Hindu. Fungsi

hukum waris menurut adat adalah mengatur penerusan dan pemindahan barang-barang materiil maupun immateriil dari pewaris kepada ahli waris. Ahli waris di Bali adalah setiap anak laki-laki dalam hubungan *purusa* selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan atau setiap *sentana rajeg* selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan. Sedangkan anak wanita bukan ahli waris, akan tetapi berhak atas bagian harta warisan selama tidak terputus haknya tersebut (ia hanya mempunyai hak menikmati saja) dan akan terputus haknya secara langsung apabila ia telah kawin keluar.

Dan syarat-syarat sebagai ahli waris apabila dilihat dari penjelasan diatas antara lain adalah:

1. Ada hubungan darah antara orang tersebut (si ahli waris) dengan si pewaris.
2. Ia adalah laki-laki atau seorang wanita yang statusnya telah diangkat sebagai laki-laki (*sentana rajeg*).
3. Selama haknya tidak terputus sebagai ahli waris.
4. Selama ahli waris tersebut tidak meninggalkan agama hindu.

Sedangkan untuka anak luar kawin baik ia anak *bebinjat* ataupun anak *astra* tidak termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut diatas, sehingga dengan demikian jelas pula dapat diketahui bahwa anak luar kawin baik anak *bebinjat* ataupun anak *astra* secara hukum tidak menjadi ahli

waris dari laki-laki yang menurunkan/ menjadikannya. Namun untuk anak *astra* secara moral sering mendapat bantuan biaya hidup dari laki-laki yang menjadikannya tersebut (ayah biologisnya).

Menurut penelitian yang dilakukan Soeripto di Bali, seorang anak *astra* dapat diangkat anak sah apabila orang tua biologisnya kemudian kawin sah walaupun anak tersebut lahir sebelum perkawinan dilangsungkan.

Hal ini juga didukung oleh pendapat N. Sukerti yang melakukan penelitian mengenai anak *astra* di Daerah Tingkat II Tabanan Propinsi Bali , bahwa pada masa sekarang ini terhadap kelahiran seorang anak *astra* sering terjadi pengakuan dan pengesahan oleh orang tuanya (bapak biologisnya).

Dengan dilakukannya pengakuan dan pengesahan oleh bapak biologisnya terhadap anak *astra* tersebut, maka anak yang bersangkutan menjadi anak sah.

Menurut hukum adat dengan adanya pengakuan anak *astra* tersebut, maka sejak saat disahkannya anak yang bersangkutan telah menimbulkan hubungan hukum dengan Bapaknya. Tanpa pengakuan tersebut pada dasarnya anak itu bukan anak dari siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. Lain halnya dengan anak sah, yang walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang, tetapi dari ketentuan-

ketentuan yang ada ditafsirkan demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.²⁵

Kata “demi hukum” disini dimaksudkan bahwa hubungan hukum dengan orang tuanya terjadi secara otomatis, dengan sendirinya tanpa yang bersangkutan harus berbuat apa-apa. Dapat dipertegas kembali bahwa hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Sedangkan dalam anak *astra* didasarkan dalam arti biologisnya bukan secara yuridis ia hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja.

Perbedaan pokok tersebut diatas, tentunya akan membawa konsekwensi yang berbeda didalam hukum, khususnya dilihat dari hukum keluarga dan hukum adat waris.

Lebih lanjut dikatakan , bahwa posisi anak luar kawin seperti yang disampaikan diatas adalah pandangan hukum, yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya, banyak anak-anak tersebut yang diterima dan diperlakukan sama dengan seorang anak sah dalam keluarga yang bersangkutan.²⁶

²⁵ Satrio,J.” Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang “, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 106.

²⁶ Satrio, J. Ibid. h. 107

Hal itu merupakan tanda, bahwa lembaga perkawinan bukan merupakan lembaga yang memang ada menurut alamnya, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan oleh Undang-undang, padahal keabsahan suatu perkawinan yang menentukan keabsahan seorang anak didasarkan atas adanya suatu perkawinan yang sah.

BAB III

METODELOGI

3.1. Bahan-Bahan/Materi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, data yang didapat dari buku-buku dan pendapat-pendapat dari para ahli / sarjana serta hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Bahan – bahan tersebut terdiri dari :

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974
- b. Kitab Agama yaitu Manawa Dharmasastra
- c. Berbagai Hasil Penelitian Ilmiah mengenai Anak Astra
- d. Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan adat, Pewarisan dan Kekerabatan Adat Bali.
- e. Majalah Hukum .

2. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah kekeluargaan dan pewarisan adat. Untuk memperoleh data primer tersebut maka ditentukan lokasi dan subyek penelitian.

Penentuan lokasi dan subyek penelitian dalam pelaksanaan penelitian lapangan ditentukan sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian :

Penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat Adat Bali, yaitu masyarakat Hindu di Griya Abian Sanur di Banjar Buruwan, Desa Sanur Kaja , Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

b. Subyek Penelitian

Penelitian ini terbatas hanya pada masyarakat Adat Bali di Griya Abian Sanur, Banjar Buruwan, Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Mereka adalah :

1. Orang tua (bapak dan Ibu biologis) dari anak *astra* yaitu orang yang membenihkan dan yang melahirkan anak *astra* tersebut.
2. Anak *Astra* bersangkutan.
3. Pemuka Adat yaitu *penglingsir* (sesepuh/tetua) Adat dari Griya Abian Sanur, Keliān Adat Banjar Buruwan Sanur, yang mempunyai kedudukan khusus dalam masyarakat karena mereka adalah yang mempunyai pengalaman hidup, mempunyai pengetahuan agama, mempunyai kemampuan dan kewibawaan didalam adat dan kemasyarakatan mereka umumnya dijadikan tempat untuk bertanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul baik antar keluarga maupun dalam masyarakat.
4. Pemuka Agama yaitu *Ida Pedanda* merupakan seorang pendeta dalam masyarakat Hindu sebagai pemimpin tertinggi dalam hal *pemupul*/menyelesaikan semua upacara-upacara agama .

3.2. Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan masalah ini digunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu metode yang mengkaji permasalahan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau norma hukum yang berlaku dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat adat serta kaidah yang bersifat perilaku berulang-ulang dalam hukum adat..

3.3. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Terhadap hasil yang diperoleh dari sumber data kepustakaan, data dikumpulkan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (studi dokumen), yaitu dengan membaca untuk menggali informasi, dan dari membaca pendapat-pendapat dari para sarjana.
- 2) Terhadap sumber lapangan, data dikumpulkan dengan teknik wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bentuk pedoman wawancara dibuat secara bervariasi antara pedoman berstruktur dan pedoman yang tidak berstruktur yang disebut dengan semi struktur.

Dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian dari beberapa pertanyaan diperdalam lagi

untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga diperoleh keterangan yang lebih lengkap lagi. Wawancara ini dilakukan kepada responden dan informan. Responden yaitu orang yang mengalami sendiri kejadian/peristiwa tersebut dalam hal ini adalah anak astra dan orang tua biologisnya, sedangkan informan adalah orang yang mengetahui peristiwa atau kejadian tentang permasalahan yang diteliti dalam hal ini Ida pedanda (pendeta), sesepuh/pengelingsir di desa adat sanur.

3.4. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian langkah-langkah yang ditempuh terdiri dari tiga tahap , yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan dan dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, kemudian dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Selanjutnya dilakukan dengan tahap wawancara, pedoman wawancara dan pembuatan surat ijin penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini dibagi dalam dua tahap, yaitu :

- a. Pelaksanaan dalam penelitian kepustakaan dimana dilakukan pengumpulan dan pengkajian data sekunder, yang ada hubungannya dengan materi penelitian.
- b. Pelaksanaan dalam penelitian lapangan, dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data melalui wawancara yang telah ditentukan.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisa data dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan laporan awal serta konsultasi dan kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan akhir.

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan yang selanjutnya data tersebut diolah. Dari data yang telah diolah, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang maksudnya bahwa pada penelitian ini, data yang diperoleh bukan berupa angka-angka atau statistik, melainkan

dengan menganalisa data-data yang diperoleh baik yang ada di perpustakaan maupun yang ada di lapangan. Selanjutnya data yang dianalisa tersebut disajikan dalam bentuk tesis secara deskriptif analitis, dimana penyajiannya dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan analisa kebenarannya.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

4.1. Tinjauan Umum

4.1.1. Letak Desa

Desa Sanur Kaja terletak di bagian selatan Pulau Bali , Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan atau lebih dikenal dengan sebutan Bali Selatan. Status hukum dari Desa Sanur Kaja adalah sebagai desa definitif bukan sebagai desa persiapan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada. Adapun letak geografisnya daratan yang berdekatan dengan pantai Sanur.

Jarak Desa Sanur Kaja dengan Kota Denpasar lebih kurang 7 Kilometer dan dapat ditempuh dengan jalan darat dengan menggunakan angkutan kota (bemo) , taxi dalam waktu kurang lebih lima belas menit.

4.1.2 Wilayah Desa

Desa Sanur Kaja memiliki luas wilayah kurang lebih 629 Ha, yang diantaranya meliputi :

1. Luas lahan sawah : 800 Ha
2. Luas lahan bukan sawah untuk :
 - Perumahan dan pemukiman seluas 172,7 Ha
 - Lahan untuk bangunan industri seluas 120 Ha

- Lahan untuk bangunan perkantoran dan pertokoan seluas 38,42 Ha
- Lahan lainnya (tidak termasuk hutan negara) seluas 0,90 Ha

Desa Sanur Kaja terdiri dari 9 (sembilan) Banjar yaitu satu kesatuan masyarakat adat dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan desa yang dipimpin oleh seorang Kelian Banjar.

Adapun Banjar-Banjar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Banjar Batan Poh
2. Banjar Pekandelan
3. Banjar Langon
4. Banjar Singgi
5. Banjar Buruwan
6. Banjar Anggarkasih
7. Banjar Tegal Asah
8. Banjar Belong
9. Banjar Wirasana

4.1.3. Penduduk

Mayoritas yang berdiam di wilayah hukum Desa Sanur Kaja adalah suku Bali yang memeluk Agama Hindu.

Bahwa menurut data yang ada sampai akhir bulan Juni tahun 2002 jumlah penduduk yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Laki-laki berjumlah 3886 orang
- b. Perempuan berjumlah 3994 orang
- c. Jumlah keluarga 1554 keluarga

Sumber penghasilan dari penduduk masyarakat Desa Sanur Kaja adalah sebagian besar dalam bidang perdagangan besar atau eceran, rumah makan serta akomodasi.. Dan perekonomian disini dikuasai oleh sebagian besar oleh masyarakat lokal disamping ada juga sebagian kecil dari masyarakat pendatang.

4.2 Posisi Kasus

Pada bulan Agustus 1987 seorang wanita dari Kasta *Sudra* yang bernama Ni Nyoman Repig dan seorang laki-laki dari Kasta *Brahmana* yang bernama Ida Bagus Sudana mengutarakan niatnya untuk melangsungkan perkawinan kepada keluarga besar dari Ida Bagus Sudana, namun setelah diketahui bahwa Ni Nyoman Repig telah mengandung yang usia kandungannya sudah hampir sembilan bulan maka mereka tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan tersebut dengan alasan usia kandungan telah melebihi 5 bulan maka menurut kepercayaan yang ada pada keluarga besar dari Ida Bagus Sudana di Griya Abian Buruan Sanur

bahwa dengan adanya perbedaan kasta dari kedua calon mempelai sangat mempengaruhi keberadaan si anak yang masih dalam kandungan dimana ada kecurigaan yang sangat besar bahwa nantinya yang turun berreinkarnasi adalah bukan dari leluhur pihak mempelai pria.

Akibat dari hal tersebut diatas maka kedua mempelai harus mengurungkan niatnya untuk melangsungkan upacara perkawinannya. Dan hal ini baru dapat dilakukannya apabila anak yang di dalam kandungan tersebut telah lahir. Dan kemudian saat yang ditunggu tiba, pada tanggal 29 Agustus 1987, lahirlah anak yang dikandung oleh I Nyoman Repig tersebut dan sebagai tanggung jawab moral dari pihak keluarga mempelai pria bersedia untuk mengadakan upacara perkawinan tersebut. Namun ada satu hal yang sangat mendasar yang tetap tidak dapat dilakukan bahwa anak dari hasil hubungan mereka adalah bukan sebagai anak sah melainkan seorang anak luar kawin dalam hal ini adalah anak *astra*.

Anak tersebut bernama I Putu Bagus Sudiadnyana, dan ibunya setelah perkawinan tersebut dilangsungkan berganti nama menjadi Jero Cenaga sebab derajatnya menjadi naik setelah ia menikah dengan seorang laki-laki dari golongan *Tri Wangsa* dalam hal ini dari Kasta *Brahmana* . I Putu Bagus Sudiadnyana tidak diperkenankan untuk mempergunakan kasta dari Bapaknya hal ini sesuai dengan hasil keputusan dari *Peparuman* (rapat) yang dilakukan oleh *penglingsir-penglingsir* (sesepuh) di Griya

Abian Buruan Sanur. Alasan yang dikemukakan kenapa si anak tidak diperkenankan memakai kasta bapaknya karena pada saat orang tuanya akan melangsungkan perkawinan si ibu sudah dalam keadaan hamil tua sehingga dicurigai yang bereinkarnasi kepadanya bukan dari leluhur si bapak. Namun setelah diadakan upacara mepeluasan ternyata yang turun reinkarnasi kepadanya ternyata adalah dari leluhur keluarga si Bapak. Namun hal ini karena terlanjur telah terjadi maka walaupun dari pihak orang tua berkeinginan untuk melakukan pengesahan terhadap anak tersebut hal ini tetap tidak diperkenankan kerana suatu pengakuan terhadap anak *astra* belum pernah terjadi di Desa Adat Sanur, walaupun I Putu Bagus Sudiadnyana tidak diperkenankan memakai kasta bapaknya, ia tetap diperkenankan untuk tinggal bersama kedua orang tuanya di lingkungan Griya Abian Buruan Sanur, namun ia tetap bukan merupakan bagian dari keluarga besar bapaknya. Secara moral kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban kepada I Putu Bagus Sudiadnyana seperti kewajiban untuk melakukan upacara-upacara *Manusa Yadnya* bagi si anak mulai dari upacara *Kepus Puser* (lepasnya puser bayi), upacara *Tigang Sasih* (pada saat bayi berumur tiga bulan), upacara *Otonan* (pada saat bayi berumur enam bulan), upacara *Menek Bajang*/akil balik (pada saat anak-anak memasuki usia remaja), upacara *Mepandes* (potong gigi) sampai upacara perkawinan semua upacara-upacara tersebut dapat dilakukan di *Merajan* (tempat suci

keluarga) bapaknya namun *Banten-Banten* (sesajen) yang dipergunakan tidak dapat dihaturkan diatas sebagaimana mestinya , hanya dapat dihaturkan dibawah saja, sampai pada saatnya ia kawin setelah itu ia akan keluar dari lingkungan Griya dan akan membuat *Merajan* (tempat suci keluarga) sendiri. Dimana untuk Silsilah keluarga akan dimulai untuk pertama kalinya dari I Putu Bagus Sudiadnyana tersebut.

Dalam hal kebutuhannya sehari –hari, seperti biaya untuk sekolah, biaya makan, tetap ditanggung oleh orang tuanya sampai ia bisa berusaha sendiri. Empat tahun kemudian Jero Cenaga kembali melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ida Bagus Mahendra. Anak kedua ini diperkenankan untuk memakai kasta bapaknya sebab sebelum ibunya hamil telah dilakukan perkawinan yang sah. Jadi walaupun antara I Putu Bagus Sudiadnyana dan Ida Bagus Mahendra terlahir dari orang tua yang sama mereka memiliki perbedaan Kasta karena keterlambatan pelaksanaan upacara perkawinan pada saat si ibu dalam keadaan hamil. Dengan adanya perbedaan Kasta dalam hubungan kakak beradik tersebut maka ada sikap - sikap yang harus dipatuhi oleh keduanya seperti dalam hal *Parid Memarid* dan *Saling Sumbah*, sang kakak boleh *Memarid* dan *Menyumbah* adiknya sedangkan sang adik tidak dapat melakukan *Penyumbahan* dan *Memarid* kakaknya. Dalam berbicara dengan adiknya sang kakak tidak boleh sembarangan, ia harus memperhatikan *Sor Singgih Basa*, yaitu sang kakak

harus memperhatikan tata cara berbicara dimana ia harus selalu berbahasa halus kepada adiknya sedangkan sang adik tidak diharuskan untuk berbicara dengan berbahasa halus terhadap kakaknya tersebut.

Demikian juga halnya dengan tata cara berbicara dan bertingkah laku dengan kedua orang tuanya serta kerabat dari sang bapak biologis tersebut, si anak astra harus memperhatikannya.

Terjadi pula perbedaan cara penyebutan panggilan terhadap orang tuanya antara sang kakak dan adik, dimana sang kakak memanggil bapaknya dengan sebutan *Ratu Aji* dan memanggil ibunya dengan sebutan *Jero*, sedangkan adiknya tetap pada panggilan bapak dan ibu, sang kakak juga memanggil adiknya dengan sebutan *Ratu Gus*.

Selain tidak diperkenankan memakai kasta bapaknya dan masuk dalam keluarga besar Griya Abian Buruan Sanur, I Putu Bagus Sudiadnyana juga tidak berhak mewaris dari bapaknya, ia nantinya akan diberi bekal oleh bapaknya secara sukarela.

Namun sampai sekarang besar sekali keinginan kedua orang tua dari I Putu Bagus Sudiadnyana untuk melakukan pengesahan terhadap kedudukan sang anak agar menjadi anak sah serta dapat memakai kasta bapaknya dan agar sang anak berhak mewaris dari bapaknya sama seperti adinya yang terlahir setelah orang tuanya kawin sah. Pada tanggal 10 September 2002 diadakan *peparuman* (rapat) di Griya Abian Buruan

Sanur yang membahas mengenai keinginan dari kedua orang tua dari I Putu Bagus Sudiadnyana tersebut, namun hasilnya tetap tidak memperkenankan keinginan dari kedua orang tuanya untuk melakukan pengesahan terhadap I Putu Bagus Sudiadnyana untuk menjadi anak sah, dengan alasan pengesahan terhadap seorang anak astra di lingkungan desa adat Sanur belum pernah terjadi karena hal ini berkaitan dengan kasta. Apabila pengesahan terhadap I Putu Bagus Sudiadnyana diperkenankan pastilah akan ada pertentangan di lingkungan desa adat sanur dan ditakutkan hal ini akan diikuti oleh para bapak biologis yang juga mempunyai seorang Anak *astra*.

Tabel Responden

Nama	Umur	Pekerjaan	Tanggal wawancara
Ida Bagus Sudana	47 Thn	Pegawai Swasta	25 September 2002
Ni Nyoman Repig	45 Thn	Pegawai Swasta	25 September 2002
Putu Bagus Sudiadnyana	15 Thn	Pelajar	25 September 2002

Tabel Informan

Nama	Umur	Pekerjaan	Tanggal Wawancara
Ida Pedanda Gede Dauh	70 Tahun	Rohaniawan	27 September 2002
Ida Bagus Sukra	75 Tahun	Sesepuh Griya Abian Sanur	24 September 2002
I Nyoman Sadia	43 Tahun	Kelian Banjar Buruwan	24 September 2002
Ida Bagus Paramartha, SH	40 Tahun	Kepala Desa Sanur Kaja	27 September 2002

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengertian mengenai Anak Luar Kawin.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa keinginan dari Ida Bagus Sudana dan Ni Nyoman Repig untuk melangsungkan perkawinan tidak diperbolehkan oleh keluarga besar dari Griya Abian Buruan Sanur, yang merupakan keluarga besar dari Ida Bagus Sudana karena pada saat tersebut Ni Nyoman Repig telah mengandung dan usia kandungannya pada saat itu sudah tua (sudah memasuki bulan kesembilan), dan adanya perbedaan kasta diantara kedua calon mempelai dimana si laki-laki dari golongan *Tri Wangsa* dalam hal ini dari Kasta *Brahmana* dan si wanita dari golongan biasa yaitu Kasta *Sudra*. Perbedaan kasta ini sangatlah mempengaruhi karena dikhawatirkan nantinya anak yang dilahirkan bukan merupakan reinkarnasi dari leluhur bapaknya.

Hal ini disebabkan karena pada saat hamil ibunya masih berada dirumahnya dan masih mengikuti kegiatan upacara yang ada dirumahnya. Pada saat upacara tersebut berlangsung tentunya sang ibu masih menyembahyangi leluhurnya yang ada di *Sanggahnya* (tempat pemujaan dalam suatu keluarga) dan hal ini masih tetap berlangsung sampai kehamilan dari si ibu menjadi besar, dan itu berarti si anak yang berada didalam kandungan juga diajak untuk menyembah pada leluhur si ibu dan menurut kepercayaan masyarakat adat Bali seorang dari golongan *Tri Wangsa* tidak diperbolehkan untuk menyembah pada golongan yang berada dibawahnya yaitu golongan dari Kasta *Sudra*. Kejadian itu sudah dilakukan oleh Ni Nyoman Repig pada saat ia dalam keadaan hamil besar, hal inilah yang menyebabkan adanya keraguan dari pihak keluarga besar Griya Abian Buruwan sanur untuk mengijinkan perkawinan itu terjadi.

Kejadian seperti ini belumlah pernah terjadi, biasanya pada saat berlangsungnya perkawinan antara seorang laki-laki dari Kasta *Brahmana* dengan seorang wanita dari Kasta *Sudra*, si wanita tidak dalam keadaan hamil dan walaupun ada yang hamil usia kehamilannya belumlah memasuki usia lima bulan, sebab ada kepercayaan bahwa bila usia kehamilan dari si wanita sudah lebih dari lima bulan maka yang bereinkarnasi bukanlah dari leluhur si laki-laki melainkan dari leluhur si wanita. Jadi anaknya yang lahir nanti tidaklah boleh memakai kasta dari ayahnya dan kejadian ini hal inilah

yang ditakutkan terjadi, bagaimana nantinya apabila sang anak yang lahir nantinya memakai kasta dari bapaknya yaitu Kasta *Brahmana* sedangkan yang bereinkarnasi adalah leluhur dari ibunya yang berasal dari Kasta *Sudra*. Alasan inilah yang dipakai untuk tidak mengijinkan perkawinan itu dilaksanakan dan sebagai rasa tanggung jawab setelah anak tersebut lahir maka perkawinan dapat dilaksanakan sedangkan anaknya tersebut merupakan Anak *astra* yaitu anak luar kawin.

Didalam adat Bali kita mengenal adanya dua istilah anak luar kawin, yaitu Anak Bebinjat dan Anak astra, keduanya merupakan anak luar kawin letak perbedaannya adalah Anak Bebinjat tidak diketahui siapa ayahnya sedangkan Anak astra bapaknya diketahui namun diantara orang tuanya tidak dilaksanakan suatu perkawinan dan ada perbedaan kasta diantara orang tuanya tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soeripto yang menyatakan bahwa :

- a. *Anak Bebinjat* : anak luar kawin, biasanya tidak diakui dan tidak diketahui siapa bapaknya.
- b. *Anak astra* : anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkannya lebih tinggi dari kasta ibunya. Dalam hal ini bapak anak ini diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan yang sah.

Seperti diketahui, setiap keluarga memberi arti dan kedudukan yang penting terhadap keberadaan seorang anak. Hal itu disebabkan karena anak dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan dipandang sebagai tumpuan harapan orang tuanya yang pada kemudian hari wajib ditumpahkan. Disamping itu juga dipandang sebagai pelindung orang tuanya apabila orang tuanya sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk menghidupi dirinya sendiri beserta sanak keluarganya.

Anak merupakan penerus keturunan, maksudnya adalah bahwa keberadaan anak dalam suatu keluarga mempunyai fungsi untuk meneruskan generasi dari keluarganya sehingga keluarganya tersebut tidak punah

Keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya :

Ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal adalah leluhur adalah keturunan yang seorang darah yang lain.²⁷

Individu sebagai keturunan atau anggota keluarga mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, seperti boleh menggunakan nama keluarga, boleh dan berhak atas bagian kekayaan

²⁷ Soerojo Wignjodipoero II, Op. Cit h. 108.

keluarganya, wajib saling pelihara memelihara dan saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa keturunan adalah orang-orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai hubungan darah antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain yang menurunkan. Apabila keturunan tersebut dibatasi pengertiannya dalam arti anak, maka dimasyarakat sebenarnya terdapat bermacam-macam istilah anak seperti anak sah dan anak tidak sah.

Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah diantara kedua orang tuanya. Yang termasuk anak sah antara lain anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak piara. Semua itu sudah dilakukan pengesahan baik melalui upacara-upacara keagamaan maupun secara hukum adat.

Sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya atau sebelum orang tuanya menjadi suami istri secara sah.

Berikut ini diuraikan bermacam-macam anak dilihat dari statusnya antara lain :

1. Anak sah meliputi :
 - a. Anak Kandung

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah yang mempunyai kedudukan penuh sebagai anak sah baik dalam arti yuridis maupun dalam arti sosial.²⁸

Maksudnya adalah bahwa anak kandung itu ketika dilahirkan haruslah wanita yang melahirkannya ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki yang membuahnya, yang akan menjadi bapak dari anak itu. Jadi menurut hukum adat seorang anak sah sebagai anak kandung apabila pada saat ia dilahirkan, wanita yang melahirkannya ada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan bapak anak tersebut.

b. Anak Tiri.

Dalam bahasa Bali anak tiri disebut dengan istilah pianak kuwalon . Apabila seorang wanita atau seorang pria sebelum mereka kawin telah mempunyai anak dan kemudian anak itu dibawa kedalam perkawinan, maka anak tersebut merupakan Pianak Kuwalon.²⁹

c. Anak Angkat

Pengangkatan anak adalah merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, perbuatan itu dilakukan

²⁸ Djaren Saragih, Op. cit h. 14

²⁹ Soeripto K.R.M.H, Op.cit, h. 63

berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama diantara keluarga yang bersangkutan, dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat.³⁰

Di Bali anak angkat juga disebut Ngentangin waris orang tua angkatnya, antara lain berkewajiban memelihara orang tua angkatnya di hari tua, dan Mengabenkan jenazah orang tua angkatnya tersebut.

d. Anak Piara.

Anak piara ada yang menganggap sebagai pakitir semata-mata, yaitu hanya sebagai suatu panutan untuk memperoleh keturunan.

Dalam pengertian anak piara terdapat beberapa hal pokok , yaitu :

- tidak memakai upacara tertentu
- sewaktu-waktu dapat diambil oleh orang tuanya
- bukan ahli waris dari orang tua yang memeliharanya

2. Anak Tidak Sah

Bilamana anak telah lahir sebelum perkawinan dilangsungkan maka anak tersebut adalah anak luar kawin, jadi anak tidak sah sama dengan anak luar kawin. Di Daerah Bali seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa

³⁰ Sirtha I Nyoman, "Pilihan Hukum Dalam Pengangkatan Anak di Bali", Kertha Patrika, Nomor 55, Tahun XVII, Juni 1991, h. 42.

ada dua macam istilah penyebutan mengenai anak luar kawin ini yaitu anak bebinjat dan anak astra, dimana keduanya memiliki pengertian yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan diatas.

4.3.2. Pengertian Mengenai Kasta yang Ada Di Dalam Masyarakat Hindu Bali.

Berbicara mengenai kasta di dalam masyarakat Hindu Bali mengenal ada empat tingkatan yaitu *Brahmana*, *Ksatriya*, *Wesya*, *Sudra*. Ketiga kasta yang disebutkan pertama yaitu *Brahmana*, *Ksatriya* dan *Wesya* disebut sebagai golongan *Tri Wangsa* sedangkan kasta *Sudra* diistilahkan golongan biasa.

Menurut Gde Panetje golongan *Tri Wangsa* merupakan tiga kasta tertinggi dari empat kasta yang ada, yaitu: *Brahmana*, *Ksatriya*, *Wesya*, sedangkan yang tidak termasuk dalam golongan *Tri Wangsa* adalah kasta *Sudra*.

- *Brahmana* terbagi atas golongan Kemenuh, Manuaba, Keniten, Mas Antapan, dimana titel yang tedapat dimuka namanya adalah Ida atau Ida bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk wanitanya. Semua golongan ini asal keturunan *Danghyang Niratha* (*Pedanda Sakti Wau Rauh*), beliau memiliki beberapa istri yang menurunkan satu golongan itu.

- *Ksatrya* terdiri atas golongan *Ksatrya Dalem* dengan titelnya yaitu cokorda atau anak agung, mereka merupakan keturunan *Brahmana Danghyang Kepakisan*; golongan *Pradewa* biasanya bertitel Dewa untuk si laki-laki dan desak untuk wanitanya, merupakan asal keturunan *Dalem Gelgel* yang sudah tidak memegang kekuasaan; golongan *Pungakan* dengan titel ngakan bagi laki-lakinya dan desak untuk wanitanya, asal turunan *Dalem Gelgel* dengan istri dari kasta yang lebih rendah; golongan *prabagus* yang titelnya adalah bagus dan ayu, merupakan keturunan *Adi Dalem Waturenggong* yang tidak memegang kekuasaan ; golongan *Prasangyang* dengan titel sang untuk laki-lakinya dan sang ayu untuk wanitanya, merupakan keturunan *Bendesa Pandak* (Tabanan) yang diangkat *ksatrya* oleh *Dalem Ketut*.
- *Wesya* terbagi atas golongan *Arya* dengan titel I Gusti, asal keturunannya adalah para *arya* dari Jawa yang bersama *Patih Gajah Mada* datang ke Bali dan kemudian memerintah. Golongan *Gusti* (jajaran) dengan gusti tanpa I untuk laki-lakinya dan sayu untuk wanitanya, merupakan keturunan para *arya* Jawa yang tidak memerintah; golongan *gusti* dengan titel *gusi* bagi laki-lakinya dan Ni Luh untuk wanitanya, merupakan keturunan *Wesya Jawa*.

Maka berdasarkan perbedaan kasta tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam hal perkawinan antara pengantin yang berasal dari kasta yang sama dengan pengantin dari kasta yang berbeda, hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Hindu Bali, yaitu sistem kekeluargaan yang patrilineal.

Kasta yang ada di Bali adalah berdasarkan pada pengertian dasar pada istilah kasta yang ada dan berlaku saat ini di Negara India.

Istilah Kasta bukan berasal dari bahasa Sansekerta namun berasal dari bahasa Portugal/Portugis dari kata "Caste" yang artinya tingkatan-tingkatan. Kasta adalah stratifikasi masyarakat India pada jaman lampau. Kasta adalah produk sosial historis masyarakat India pada masa lampau. Kasta di India membeda-bedakan harkat dan martabat manusia berdasarkan keturunan. Kasta membagi masyarakat menjadi empat golongan secara vertikal genealogis. Kasta Brahmana sebagai golongan tertinggi, Ksatria golongan kedua, Waisya dan Sudra kasta yang paling rendah. Dan lebih lagi di India dikenal adanya kasta Paria sebagai Kasta Candala, yang artinya seseorang dalam keadaan cacat.³¹

Menurut hypotesa Prof. Giles, Suku bangsa Arya yang ada di India sekarang adalah berasal dari Eropa Tengah. Kedatangan Suku bangsa Arya yang mulanya tidak suka kawin dengan orang-orang pribumi yang kulitnya

³¹. Wiana, Ketut. Raka Santeri, "Kasta Dalam Hindu", Yayasan Darma Naradha, Denpasar, 1993, h. 18.

hitam menyebabkan lama kelamaan prajurit-prajurit Arya kesulitan untuk mendapatkan istri. Keadaan ini menyebabkan terjadinya percampuran darah antara suku bangsa Arya yang kulitnya putih dengan suku bangsa Dravida yang kulitnya hitam. Percampuran antara suku bangsa Arya dengan suku bangsa Dravida inilah yang mendatangkan masalah pelapisan sosial yang tumbuh menjadi kasta. Orang-orang suku bangsa Arya yang kulitnya putih, tubuhnya lebih tinggi dan kecerdasannya lebih tinggi menjadi lapisan atas atau kasta yang lebih tinggi dengan hak-haknya yang lebih istimewa.

Suku-suku bangsa Arya sebelum memasuki India pernah menetap di Oksus setelah pindah dari daerah Eropa Tengah. Ketika menetap di Oksus, suku bangsa Arya sudah memiliki pembagian masyarakat berdasarkan profesi, yaitu dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Golongan Rohaniawan dan cendikiawan yang berkembang menjadi warna Brahmana.
2. Golongan prajurit dan para politisi berkembang menjadi warna Ksatria
3. Golongan pedagang dan usaha-usaha ekonomi lainnya menjadi warna Waisya.

Sampai pada abad kedua puluh ini, masyarakat India boleh dikatakan masih ada yang berpandangan tradisional, menjadikan kasta sebagai pegangan hidupnya bermasyarakat. Jika wanita kasta Brahmana

dikawini oleh laki-laki dari kasta Sudra, iapun akan dikucilkan dari masyarakat, bahkan didesa-desa terpencil akan dijatuhi sanksi hukuman jasmani. Tetapi lain halnya mereka yang telah berpikiran modern, tidak lagi memandang kasta itu sebagai hal yang perlu diperhatikan.

4.3.3. Adat istiadat Perkawinan Masyarakat Hindu Di Bali

Dalam masyarakat hindu ada empat tahap kehidupan yang sekarang masih dilakukan namun sudah dimodifikasi sesuai dengan desa kala patra yaitu tempat, waktu dan keadaan. Keempat tahapan hidup itu disebut dengan catur warga.

Tahap pertama adalah Brahmachari yaitu tahap belajar atau menuntut ilmu.

Tahap kedua adalah Grhastha ialah tahap selesai belajar yaitu berumah tangga.

Tahap ketiga adalah Wanaprastha yaitu meninggalkan keluarga yang sudah mapan untuk bertapa di hutan (wana), lepas dari urusan kehidupan keluarga.

Tahap keempat disebut Sanyasin, yaitu setelah tapa dengan hasil gemilang ia harus mengembara kedesa-desa untuk menyebarkan ilmu kerohanian yang didapatnya sewaktu bertapa itu dan tidak boleh tinggal di suatu desa lebih dari satu minggu.

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974, semua perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama hindu, didasarkan pada hukum adat yang berlaku disuatu daerah lingkungan masyarakat adat dan sebagian lagi atas hukum agama hindu. Berkenaan dengan masalah hukum agama itu sendiri belum banyak dikenal oleh masyarakat. Untuk dapat mengetahui proses pertunbuhan hukum hindu yang dewasa ini sebagian besar telah diserapi menjadi hukum adat perlu diketahui latar belakang masalah perkembangan hukum hindu di Indonesia.

Ada pun dewasa ini, dengan telah diberlakukannya UU No 1 tahun 1974 maka sedikitnya tertampung kebutuhan hukum perkawinan hindu secara lebih positif, dibandingkan dengan sebelumnya yang samar-samar didalam hukum adat. Walaupun demikian tidak berarti perkawina hindu seblaeum adanya UU itu dianggap tidak sah. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat hindu menurut hukum hindu sebagaimana diatur dengan tegas didalam kitab sucinya tidaklah bertentangan dengan perUUan nasional yang ada.

Bagi masyarakat hindu, masalah perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Istilah

perkawinan sebagaimana terdapat didalam berbagai sastradan kitab hukum hindu (smerti) dikenal dengan nama wiwaha.³²

Wiwaha sebagai dharma adalah suatu ritual yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut hukum hindu. Menurut ajaran manusmerti, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu. Sebagai akibat dari adanya pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa suatu perkawina adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sahnya perkawinan hindu harus menurut agama hindu.

Berdasarkan tradisi atau hukum adat yang berlaku di bali sebelum adanya UU No1 tahun 1974 tidak ada surat kawin yang dibuat oleh instansi pemerintah yang seragam untuk umat hindu. Surat untuk pengesahan perkawinan dapat dimintakan pada camat ataupun lurah karena pejabat itu hadir pada upacara perkawinan yang disaksikan oleh masyarakat atau oleh seluruh anggota banjar dimana pengantin laki-laki menjadi anggotanya.

Upacara perkawinan yang dipimpin oleh sulinggih sudah merupakan perkawinan yang sah, baik dari sudut agama maupun hukum karena disaksikan oleh lurah dan camat terutama oleh masyarakat itu sendiri.

³² Rai Sudartha, cok, " Manusia Hindu dari kandungan sampai perkawinan ", Yayasan Dharma Naradha, cetakan I, 1993, hal 71.

Didalam masyarakat hindu terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu :

1. Mepadik (meminang atau meminta)
2. Ngerorod atau rangkat yang juga disebut cara selarian (sama-sama lari berdasarkan cinta)
3. Nyentana (yaitu si laki-laki diambil oleh si wanita dan tinggal di rumah si wanita).
4. Nyeburin yaitu si wanita yang datang sendiri ke rumah laki-laki tanpa minta ijin orang tuanya.
5. Ngunggahin (merupakan salah satu bentuk perkembangan tersendiri dari cara nyeburin).
6. Melegandang (melarikan wanita secara paksa)³³

Kedua bentuk terakhir tersebut diatas kurang mendapat apresiasi sehingga jarang dijumpai dalam praktek, bahkan cara melegandang merupakan tindak kriminal dan dapat diancam pidana karena suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan kekerasan tanpa persetujuan calon istri maupun oarang tuanya. Bentuk ini sama halnya dengan perkosaan, karena itu tidak dapat disahkan perkawinanya.

Upacara perkawinan Hindu di Bali bila diamati ada tiga tahapan upacara yaitu :

³³ Ibid, hal 73

a. Upacara Pendahuluan

Ada juga yang menyebutkan *Beakawon* dan juga yang menyebutnya *Mekalan-kalan*. Upacara ini dilakukan oleh seorang rohaniawan yang disebut dengan *Pemangku*. Fungsi dari upacara ini agar kedua mempelai dapat dihilangkan *Sebel Kandelnya* hingga wajar untuk dilanjutkan upacara lainnya.

b. Upacara Pokok

Sering upacara ini disebut Upacara *Widi Wedana*. Upacara ini biasanya dilakukan pada saat hari yang berbeda dengan upacara *beakawon* tetapi dapat juga dilakukan pada hari yang bersamaan. Upacara ini dilangsungkan oleh Pendeta/*Pedanda*. Merupakan upacara penutup baik secara adat, agama maupun sosial kemasyarakatan, dengan mana kesucian dan kesahan perkawinan tidak diragukan walaupun upacara lanjutan tersebut dibawah (huruf c) tidak diadakan lagi.

c. Upacara Lanjutan

Upacara ini ada kalanya dilakukan lama setelah upacara *Widi Wedana* namun kadang-kadang dilakukan pada hari yang bersamaan. Dalam upacara ini si mempelai wanita Mepamit kepada leluhurnya dengan cara membawa *Gagapan* atau *Tipat Bantal* yang dipersembahkan di *sanggah/Merajan* si mempelai

wanita. Upacara ini secara agama bertujuan untuk lebih meningkatkan nilai kesucian atau meningkatkan nilai kesusilaan hubungan perbesanan antara pihak keluarga wanita dengan pihak keluarga laki-laki.

Seperti yang kita ketahui bahwa didalam masyarakat adat di Indonesia mengenal ada tiga (3) sistem kekeluargaan yaitu: Patrilineal, Matrilinial dan Parental.

- a. Sistem Patrilineal yaitu suatu masyarakat hukum dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui bapak, bapak dari bapak terus keatas sehingga sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yan timbul dari sistem ini adalah anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik bapak/ keluarga bapak Dapat dikatakan kedudukan pria lebih menonjol dari wanita didalam pewarisan. Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistim uang jujur, yaitu sebagai pelepas dan pengganti keseimbangan lahir dan bathin dari keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga pihak suami kepada keluarga pihak istri , maka dengan demikian lepaslah sudah wanita tersebut dari keluarga asalnya masuk kedalam keluarga suami.

- b. Sistem Matrilineal yaitu suatu sistim dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul adalah : semua keluarga adalah keluarga ibu , anak-anak adalah masuk keluarga ibu dan mewaris pula dari ibu/keluarga ibu.

Bapak tidak masuk hukum keluarga ibu/istrinya.

Sistim kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria dalam bidang pewarisan .

- c. Sistim Bilateral adalah masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya. Dalam sistim ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.³⁴

Nampaknya ketiga sistim tersebut diatas masih cukup kuat bertahan terutama di pedesaan, sedangkan perkembangan di kota-kota pada dewasa ini nampaknya sudah banyak mengarah ke sistim parental.

Dalam masyarakat Hindu Bali yang menganut sistim kekeluargaan Patrilineal dimana kedudukan pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan

³⁴ Sugangga, I.G.N. "Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistim Patrilineal di Indonesia", Diktat Kuliah UNDIP, Semarang , 1988, h. 17

kedudukan pihak wanitanya, dimana bila terjadi perkawinan maka pihak wanitanya yang masuk kedalam keluarga pihak laki-laki dan si wanita dianggap sudah lepas dari keluarganya, demikian juga anak-anak yang lahir nantinya akan masuk kedalam keluarga bapaknya dan tidak kedalam keluarga ibunya.

Bila perkawinan terjadi antara pengantin yang kastanya sama maka tidak akan terjadi persoalan, lain halnya apabila pengantinya berbeda kasta, apabila pihak laki-lakinya lebih tinggi kastanya maka pihak wanitanya ikut terangkat derajatnya sedangkan bila pihak laki-lakinya kastanya lebih rendah maka pihak wanitanya kastanya menjadi turun mengikuti kasta pihak laki-laki.

Namun bila kejadiannya seperti kasus yang sedang kita bahas maka dalam hal ini menurut kepercayaan dari keluarga Griya Abian Buruwan Sanur diragukan siapa yang bereinkarnasi terhadap si anak yang masih didalam kandungan mengingat kasta ibunya yang lebih rendah dari kasta bapaknya dimana pada saat itu usia kehamilan dari si ibu sudah tinggal menanti kelahirannya saja. Dengan alasan itulah pihak Griya Abian Buruwan Sanur meminta agar perkawinan itu ditunda sampai anak tersebut lahir dan setelah itu barulah perkawinan tersebut dapat dilaksanakan, yang mengakibatkan derajat si ibu menjadi naik sedangkan anak yang telah dilahirkan tidak dapat mengikuti kasta bapaknya, anak inilah yang disebut sebagai *Anak astra*.

4.3.4. Hak dan Kewajiban Anak astra setelah orang tuanya kawin sah dalam hukum kekeluargaan Adat Bali.

Tidak ada hubungan hukum antara anak astra dengan keluarga sedarah yaitu antara ayah dan ibunya yang telah kawin sah dan dengan adik-adikny ayang terlahir kemudian. Hal ini terbukti dari :

1. Seorang anak astra bila ditinjau dari segi kasta, sudah jelas ia tidak mengikuti kasta ayahnya dengan demikian kedudukannya tidak sama dengan kasta ayahnya, seperti halnya anggota-anggota keluarga yang lahir dilingkungan keluarga golongan Tri Wangsa (Griya, Jero).
2. Seorang anak astra tidak diperkenankan menggunakan bahasa kasar pada saat ia berbicara dengan Bapaknya, seperti halnya dengan seorang anak kandung/anak sah memanggil ayahnya dengan sebutan Aji, maka seorang anak astra memanggil sebutan bapaknya dengan Atu Aji (Ratu Aji).
3. Demikian pula halnya seorang anak astra dalam hubungannya dengan saudara-saudaranya yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang tidak sama . Perbedaan kedudukan Anak astra dengan adik-adiknya yang terlahir setelah orang tuanya kawin sah sangat jelas

kelihatan, yaitu dengan adanya perbedaan kasta dimana si anak astra tidak mengikuti kasta Bapaknya sedangkan adik-adiknya mengikuti kasta bapaknya. Dalam hal ini dapat dilihat dari namanya. Bila adik-adik dari anak astra tersebut memakai titel Ida Bagus untuk anak laki-laki dan Ida Ayu untuk anak perempuan sedangkan si Anak astra tidak boleh menggunakan titel itu, ia hanya dapat menggunakan titel I Putu atau I Made.

4. Terhadap ibunya yang telah kawin sah dengan ayah biologisnya, dimana derajat ibunya sudah dengan sendirinya naik menjadi seorang Jero Mekel, dan itu berarti seorang anak astra harus memanggil ibunya dengan sebutan Jero Mekel, sedangkan adik-adiknya memanggil dengan sebutan ibu.
5. Anak astra bila ditinjau dari segi hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan saudara-saudara ataupun dengan bapaknya, walaupun secara biologisnya anak astra dan saudara-saudaranya mempunyai ayah dan ibu yang sama. Artinya adik-adiknya yang sekandung yang terlahir setelah dilakukan perkawinan yang sah diantara kedua orang tuanya

si anak astra dalam arti biologis merupakan saudara kandung dari adik-adiknya yaitu saudara dari satu bapak dan satu ibu, tetapi bila dilihat dari segi hukum adat anak astra bukanlah saudara dari adik-adiknya hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan kedudukan anak astra dalam lingkungan keluarga bapak biologisnya.

Seperti kita ketahui tata susunan kekeluargaan di Bali bersifat patrilineal yaitu mengikuti garis bapak, tetapi itu bukan berarti hanya mengenal hubungan kekeluargaan dari pihak bapak saja, melainkan juga hubungan kekeluargaan dari pihak ibu. Namun hubungan secara hukum adat bali, hubungan seorang anak dengan kerabat pihak bapak mempunyai derajat yang lebih penting dari pada dengan kerabat dari pihak ibu. Hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan kerabat ibunya tidak menimbulkan hubungan hukum antara lain dalam hal wris mewaris, begitu pula dalam kaitannya dalam kewajiban-kewajiban keagamaan (*ngaben*, *nyumbah leluhur*) dan lain-lain.³⁵

Hubungan antara anak astra dengan kerabat bapak biologisnya tentu saja berbeda dengan hubungan anak sah (anak kandung) dengan kerabat bapaknya tersebut. Seperti yang telah dikemukakan bahwa kasta dari anak astra tidak sama dengan kasta bapaknya itu berarti kasta Anak astra dengan

³⁵ Team peneliti fakultas hukum Universitas Udayana, Op.Cit, h.47

kerabat bapaknya juga berbeda. Si Anak astra tidak boleh sembarangan dalam berkomunikasi dengan kerabat bapaknya, dimana ia harus memperhatikan sor singgih (tata etika dalam berbicara) terutama bila ia berada dalam lingkungan Griya, Jero atau Puri.

Dalam menyebutkan nama panggilan terhadap kerabat bapaknya anak astra juga tidak boleh sembarangan /senaknya. Apabila ia berbicara (Matur) dengan kerabat bapaknya ia juga harus matur dengan menyebut Atu (Ratu) seperti sebutan Atu Wak untuk pamannya, dan Atu Biang untuk bibinya. Demikian juga ia berbicara dengan sepupunya ia harus matur dengan kata Ratu (Atu) baru menyebutkan nama orang yang bersangkutan. Hubungan anak astra dengan keluarga ibunya seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa anak astra tidak mengikuti kasta Bapaknya ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila ibunya kawin dengan Bapak biologisnya maka dengan sendirinya hubungan hukum tersebut terputus yang ada hanya hubungan kemanusiaan antara ibu dan anak

Setiap individu atau warga masyarakat secara biologis dapat menyebut setiap individu lainnya sebagai kerabat, oleh karena adanya hubungan darah melalui ayah atau ibu. Hubungan ini disetiap daerah berbeda-beda tergantung dari sistim kekeluargaan yang dianut.

Di Bali yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu menganut sistim kekeluargaan Patrilineal. Sistim kekeluargaan ini memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis laki-laki saja, oleh karena itu mengakibatkan setiap warga masyarakat memperhitungkan kerabat bapaknya saja didalam batas hubungan kekerabatan, yang lebih dikenal dengan sebutan Garis “*Purusa*”.

Menurut Hukum Adat Bali seorang anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar Bapaknya, sedangkan dengan keluarga besar ibunya ia juga memiliki hubungan kekerabatan namun tidak menentukan seperti keluarga Bapaknya.

Lain halnya dengan hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak astra) ia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya saja. Namun apabila ibunya kawin sah maka hubungan hukum tersebut menjadi terputus.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ida Bagus Sukra (informan) sebagai Penglingsir di Griya Abian Buruan Sanur pada tanggal 5 September 2002 dapat diketahui bahwa apabila bapaknya tidak menerima si anak dalam hubungan parid keparid. Saling Sumbah, Saling Tebah maka selama itu pula hubungan bapak dari anak astra tersebut dengan keluarga besarnya akan tetap berjalan dengan baik, akan tetapi apabila si Bapak

melakukan pengesahan atau menerima si anak astra sebagai anak sah, maka si Bapak akan disisihkan dari keluarga besar dan dianggap mengikuti kasta dari anaknya.

Yang dimaksud hubungan dari Parid Keparid adalah hubungannya dalam hal makanan dimana si anak astra memakan sisa makanan dari bapaknya atau keluarga besar dari bapaknya namun keluarga besar bapaknya atau bapaknya tersebut tidak boleh memakan sisa makanan dari si anak astra.

Saling Sumbah adalah : hubungan dalam hal upacara adat dimana apabila si anak astra tersebut melakukan upacara adat baik itu Otonan, Metatah, sampai pada upacara kematiannya keluarga besar bapaknya tidak boleh menyembah atau menyembahyangi si anak astra , namun bila terjadi sebaliknya si Anak astra boleh menyembahyangi keluarga bapaknya tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Saling Tebah adalah hubungan dalam hal berbahasa, yaitu si anak astra dalam hal berbicara/berbahasa dengan keluarga bapaknya tidak boleh menggunakan bahasa kasar/Basa Sor kepada bapak beserta keluarga besar bapaknya, ia harus memperhatikan Sor Singgih Basa dalam berbicara.

Namun apabila apa pengakuan dan pengesahan dari orang tua biologis dari anak astra tersebut, maka si anak astra tersebut kedudukannya akan naik menjadi anak sah dan ia akan memakai kasta bapak biologisnya

tersebut, hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh N. Sukerti dan Soeripto dimana hasil penelitiannya membenarkan bahwa pada masa sekarang ini diboolehkan adanya pengesahan seorang anak astra menjadi anak sah, sehingga kedudukannya sejajar dengan anak sah. Karena kedudukannya telah menjadi anak sah maka hubungannya anak tersebut dengan orang tua, adik-adiknya serta kerabat bapaknya yang dulunya tidak dianggap sebagai keluarga ataupun kerabat tapi setelah diakui dan disahkan maka hubungannya berubah menjadi hubungan kekeluargaan dan kekerabatan diman ia telah masuk menjadi bagian dari keluarga besar dari bapaknya.

Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat diterapkan pada masyarakat didesa sanur khususnya di griya abian buruwan sanur kaja dimana untuk mengangkat atau mengesahkan seorang anak astra menjadi anak sah tidaklah diperkenankan, karena hal ini menyangkut masalah kasta dan kehormatan keluarga besar.

4.3.5. Kewajiban Orang Tua Biologis Anak astra Terhadap Seorang Anak astra

Walaupun si Anak astra dengan orang tuanya (bapaknya) tidak memiliki hubungan hukum, si anak astra berhak mendapatkan tanggung jawab moral dari bapaknya, seperti dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan, yaitu seperti :

1. Upacara *Kepus Puser*
2. Upacara Tiga Bulanan
3. Upacara *Otonan* (enam bulan)
4. Upacara Akil Balig
5. Upacara Potong Gigi (*mepandes, mesangih*)
6. Upacara *Pawiwahan* (Perkawinan)

Upacara-upacara tersebut diatas akan tetap menjadi tanggung jawab dari bapaknya biologisnya tersebut.

-Upacara *Kepus Puser* adalah suatu upacara yang bertujuan untuk membersihkan secara spiritual tempat suci dan bangunan-bangun yang ada disekitarnya. Dalam kepercayaan umat hindu di bali mulai saat itu bayi diasuh oleh *Sanghyang Kumara* dan untuk itu dibuatkan sebuah tempat diarah kepala bayi itu tidur yang disebut *pelangkiran kumara*.

-Upacara tiga bulanan lebih dikenal dengan nama upacara *Tigang Sasih* atau upacara *Nelu Bulanin* yaitu upacara bayi umur tiga bulan ini dilakukan 105 hari setelah bayi itu lahir. Perhitungan terjadi karena satu bulan umurnya 35 hari. Upacara ini diadakan di rumah tangga sendiri atau dirumah pendeta dan tidak di pura (tempat pemujaan umum). Upacara ini adalah yang terpenting karena ia tidak akan pernah kembali diadakan upacara selama hidupnya. Itu bedanya dengan upacara enam bulan, kalau upacara pada bayi yang berumur enam bulan akan diulangi lagi untuk beberapa kali setiap

enam bulan berikutnya. Malahan banyak yang melakukan secara terus menerus sepanjang hidupnya, seperti merayakan hari ulang tahun saja. Tetapi upacara tiga bulanan ini hanya satu kali saja dilaksanakan sebagai upacara perpisahan dengan empat saudaranya yang mengikuti dan menolong pada saat bayi itu dilahirkan. Perpisahan ini hanya melepaskan unsur negatif yang dibawa oleh keempat saudara dari bayi tersebut, tetapi unsur kejiwaannya masih tetap dekat dan masih tetap bisa membantu si bayi sampai pada usia tuanya nanti.

-Upacara enam bulanan ini dinamakan satu *weton*. Kata *weton* berasal dari kata *wetuan* menjadi *weton* lalu menjadi *oton*. Upacara satu *oton* ini akan datang setiap 210 hari dan dirayakan secara keagamaan. Upacara satu *oton* ini dilakukan setiap 6 bulan sekali tidak alin maksudnya adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan bayi itu.

-Upacara Akil Balik atau upacara *Menek Kelih* atau juga sering disebut upacara *Ngeraja Swala* yaitu upacara untuk mendoakan seorang anak agar menjadi remaja yang baik, dimana upacara ini dilakukan pada saat terjadi masa peralihan seorang anak-anak menjadi seorang remaja. Kapan waktunya?, hal ini tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Bukan saja perbedaan jenis kelamin yang menentukan, tetapi perbedaan yang lain-lain juga, misalnya perbedaan suku bangsa, perbedaan sandang dan pangan, perbedaan lingkungan, perbedaan pekerjaan, perbedaan sifat, perbedaan cara

hidup, perbedaan kesehatan dan lainnya yang dapat menyebabkan perbedaan masa peralihan saat anak-anak menjadi remaja. Tanda-tanda itu biasanya terjadi pada badan seseorang. Pada laki-laki akan terjadi perubahan suara yang membesar dan tidak teratur serta tumbuhnya rambut pada beberapa bagian dari tubuhnya. Pada perempuan sama juga dengan laki-laki dalam hal tumbuhnya rambut pada beberapa bagian tubuhnya, ditambah dengan membesarnya payudara. Tetapi tanda yang paling penting pada perempuan ialah untuk pertama kalinya ia mengalami datang bulan (haid atau menstruasi).

-Upacara Potong Gigi atau Upacara *Mepandes* ini dapat dilakukan oleh anak yang telah melakukan upacara akil balik diatas, biasanya upacara ini dilakukan pada anak yang telah berumur lebih dari 16 (enam belas) tahun. Dalam upacara ini akan dipotong 4 buah gigi atas dan 2 buah taring bagian atas sehingga jumlah seluruhnya menjadi 6 buah. Secara rokhaniah kiranya pemotongan gigi yang 6 buah itu merupakan sebuah simbol untuk mengurangi apa yang disebut dengan "*sadripu*". Seperti telah diketahui bahwa menurut kepercayaan Agama Hindu, manusia digerakan oleh tiga guna yang juga disebut dengan "*trigunasakti*", yaitu:

-*Guna-satwam*, yang menimbulkan gerak tenang, menjurus kearah kebaikan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kemuliaan.

-*Guna- rajas*, menimbulkan gerak yang dinamis, bernaftsu, ingin menonjol, dikagumi, ataupun hebat.

-*Guna-tamas*, yang menimbulkan sifat yang pasif, malas, enggan untuk melakukan sesuatu tetapi ingin memperoleh hasil yang memuaskan.

Dari *guna*, *rajas*, dan *tamas* menyebabkan timbulnya 6 sifat yang dianggap kurang baik, yang disebut pula *sadripu*, seperti:

1. *Kama* (keinginan-keinginan)
2. *Krodha* (kemarahan)
3. *Lobha* (ketamakan/loba)
4. *Moha* (kemabukan)
5. *Mada* (congkak, angkuh/lengah)
6. *Matsarya* (iri-hati)

Keenam sifat (*sadripu*) itu sering menyesatkan serta menjerumuskan manusia kelembah kesengsaraan didunia dan diakhirat. Disamping itu pada umumnya keenam sifat ini dimiliki oleh mahluk-mahluk yang lebih rendah tingkatannya dari pada manusia seperti bhuta-kala, binatang atau yang lainnya. Oleh karena demikian hendaknya *guna rajas* dan *guna tamas* beserta hal-hal yang ditimbulkannya dikurangi atau dikendalikan oleh *guna-satwam* sehingga *dharma* dapat ditegakan

Tetapi secara lahiriah, pemotongan gigi itu dapat pula dianggap untuk mencapai keindahan dan kecantikan; kiranya kurang baiklah gigi itu panjang-panjang, ataupun runcing-runcing. Didalam upacara potong gigi, pemujaan terutama ditujukan kehadapan *Sanghyang Semara-Ratih* (*Dewa kama*), sebagai lambang cinta-kasih, ataupun keindahan; sebenarnya semara-Ratih merupakan salah satu nama untuk menyebut Ida Sanghyang Widi dalam wujud *Ardanareswari*.

-Upacara Perkawinan atau sering disebut dengan Upacara Pawiwahan merupakan upacara penyatuan dua jiwa , dua pribadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang disahkan dengan cara melakukan upacara pawiwahan atau perkawinan ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas upacara perkawinan dalam Masyarakat Adat Bali yang menganut Agama Hindu terdapat 3 tahapan dalam upacara perkawinan, yaitu; Upacara Pendahuluan (Upacara Beakawon/Upacara Mekalan-kalan), Upacara Pokok (Upacara Widi Widana) dan Upacara Lanjutan.

Mengenai kewajiban anak astra terhadap ayahnya, ditinjau dari segi hukum , hampir tidak ada tapi hanya ada kewajiban dari segi moral saja dari seorang anak terhadap ayahnya. Apabila bapaknya meninggal dunia, sebenarnya dari sisi hukum, si anak astra tidak mempunyai tanggung jawab, tapi dari sisi moral sebagai anak terhadap bapaknya ia berhak untuk turut melaksanakan upacara tersebut.

Oleh karena anak luar kawin khususnya anak astra tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan baik dengan bapak biologisnya , ibunya yang kemudian kawin sah dengan bapak biologisnya, maupun dengan saudara-saudaranya yang lahir setelah adanya perkawinan yang sah, anak astra juga tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan kerabat bapaknya, sehingga hal ini berakibat bahwa si anak astra tidak mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap keluarga bapaknya tersebut. Anak astra hanya mempunyai hak dan kewajiban secara moral terhadap mereka yang telah disebutkan diatas tersebut.

4.3.6. Hak dan Kewajiban Anak astra Di Kaji Dari Aspek Hukum Adat Waris Bali

Sebagai dimaklumi, umat Hindu di Bali dalam bidang hukum kekeluargaan menganut sistim Kapurusan. Artinya, pertalian seseorang dengan keluarganya bertitik berat pada garis Bapak, melanjut kakek (bapaknya dari Bapak), dan seterusnya serta tidak memperhitungkan dari garis ibu.

Dalam sistim yang begini kedudukan sorang anak laki-laki jauh lebih penting dari saudara-saudaranya yang wanita. Penting dalam arti memikul Dhana , menunaikan Pitra Puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada

leluhur), yang diiringi hak dapat menerima harta warisan atau yang disebut juga dengan ahli waris.

Pengertian ahli waris menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Waris Adat menyatakan bahwa ahli waris adalah :

Semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

Jadi ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris.

Batas antara kodratnya sukar ditarik garis pemisah, oleh karena ada yang ahli waris disuatu daerah sedangkan di daerah lain ia hanya waris, begitu pula ada yang di suatu daerah sebagai waris sedangkan ia di daerah lain ia mendapat warisan.³⁶

Di Bali menurut ajaran agama Hindu para ahli waris dapat dibedakan dalam empat (4) katagori yaitu :

1. Kelompok Ahli Waris Sapinda (Patrilineal, purusa)
2. Kelompok Ahli Waris Sakulya (Parental)
3. Kelompok Ahli Waris Sagotra (berdasarkan Guru Spiritual)
4. Kelompok Ahli Waris Raja (pemerintah)

Namun yang paling banyak berlaku menurut adat Bali adalah kelompok Sapinda, dimana para ahli waris seketurunan lelaki yang ditarik

³⁶ Hilman Hadikusuma, Op. cit . h. 27.

lenceng kebawah dan keatas, yaitu terdiri dari para ahli waris utama adalah anak lelaki, cucu, ayah, saudara, kakek.

Seorang anak sah terlahir dari perkawinan yang sah karena perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, perkawinan yang sah menurut di Desa Adat Sanur adalah perkawinan yang telah diupacarakan menurut hukum agama yaitu melalui upacara Widi Widana (Mesakapan). Anak yang lahir secara sah ini adalah merupakan ahli waris, namun apabila pada saat akan dilangsungkan perkawinan diantara seorang wanita dari kasta sudra dengan laki-laki dari golongan Tri Wangsa dan diketahui bahwa si wanita sudah hamil yang memasuki usia kandungan lebih dari 5 bulan maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Dan perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah anak dalam kandungan dari wanita tersebut lahir, tetapi anak yang lahir tersebut tidak dapat disahkan sebagai anak sah (anak astra). Anak astra tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya , artinya ia tidak merupakan ahli waris dari Bapaknya walaupun ia dinyatakan sebagai anak oleh Bapaknya tersebut.

Seorang anak astra merupakan ahli waris dari ibunya saja, namun apabila ibunya kemudian kawin sah maka putuslah hubungan hukum antara anak astra dengan ibunya , itu berarti anak astra tidak berhak lagi menjadi ahli waris dari ibunya. Namun demikian anak astra diberikan tanggungan dan

biaya hidup selama ia masih berada dalam lingkungan Griya sampai ia mampu berdiri sendiri. Biasanya bila orang tuanya mampu baik dari pihak Bapak maupun pihak Ibu akan memberikan bekal secara sukarela berupa pemberian lepas namun bukan dalam bentuk warisan.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Griya Abian Buruwan Sanur, si anak astra tersebut adalah laki-laki, apabila ia diperkenankan untuk disahkan menjadi anak sah (seperti penelitian yang dilakukan oleh N. Sukerti dan Soeripto), maka si anak astra tersebut akan menjadi anak sah dan itu berarti ia berhak menjadi ahli waris dari bapaknya, namun karena dalam kasus ini ia tidak diperkenankan untuk disahkan menjadi anak sah maka ia kedudukannya bukan sebagai ahli waris dari bapak biologisnya, ia hanya akan diberikan bekal secara sukarela oleh orang tua biologisnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan.

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka sampailah pada bab yang terakhir, yaitu Penutup. Berpedoman pada pembahasan terhadap permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Kedudukan Anak Astra yang orang tua biologisnya kawin sah tidak dapat diterima sebagai bagian dari keluarga besar bapak biologisnya, karena ia telah berada dalam kandungan ibunya lebih dari lima bulan pada saat akan dilangsungkannya upacara pengesahan perkawinan dari kedua orang tua biologisnya tersebut sehingga upacara perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, baru setelah anak astra itu lahir perkawinan antara kedua orang tua biologisnya dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di griya Abian Buruan Sanur.

Walaupun sekarang orang tua biologisnya bersedia melakukan upacara apapun agar anaknya tersebut bisa

masuk kedalam keluarga besar bapaknya dan memakai kasta dari bapak biologisnya hal tersebut tidak diperkenankan oleh sesepuh adat di griya tersebut dengan alasan hal tersebut sudah terlanjur terjadi dan dalam hal ini pengesahan dan pengakuan seorang anak astra menjadi anak sah belum pernah terjadi di desa sanur, jadi sesepuh griya tidak berani untuk memberikan ijin untuk mengesahkan anak astra tersebut.

Hal ini bertentangan dengan pendapat dari Soeripto dan hasil penelitian dari N. Sukerti di daerah Tabanan yang memperkenalkan pengakuan dan pengesahan seorang anak astra untuk bisa menjadi anak sah dan mengikuti kasta bapaknya serta bisa menjadi bagian dari keluarga besar dari bapaknya.

2. Anak Astra yang orang tua biologisnya kawin sah tidak berhak mewaris dari kedua orang tuanya tersebut, karena ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tua biologisnya yang telah kawin sah, walaupun ia mendapat tunjangan hidup dari bapak biologisnya. Hal ini juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh N. Sukerti dan Soeripto yang menyatakan bila

terjadi pengesahan terhadap anak astra maka ia juga merupakan ahli waris dari orang tuanya bila ia laki-laki, dan dalam kasus ini seharusnya si anak astra dalam kasus ini adalah merupakan ahli waris dari orang tuanya karena ia seorang laki-laki, tapi karena pengesahan tersebut tidak diperkenankan maka gugurlah haknya dari I Putu bagus Sudiadnyana (anak astra) untuk menjadi seorang ahli waris.

5.2. Saran-Saran

Dari adanya kejadian anak Astra tersebut diatas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan berhubungan dengan materi yang diuraikan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Seorang anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, maka dari itu sebaiknya kita harus bisa lebih membuka diri dan jangan hanya untuk mempertahankan rasa gengsi dan jangan hanya untuk membela kehormatan keluarga sampai kita mengorbankan hak asasi seorang anak untuk bisa diakui sebagai anak sah, karena kalau kita cermati dengan seksama sebenarnya kesalahan bukanlah terletak pada

diri si anak , melainkan adalah merupakan kesalahan dari orang tuanya. Maka sangatlah tidak adil kalau yang menerima beban atau akibat dari kesalahan orang tuanya adalah si anak. Untuk itu sangatlah bijaksana bila pihak keluarga besar dalam hal ini memperkenankan agar si anak astra ini dapat untuk disahkan menjadi anak sah dan diperkenankan agar ia dapat diakui oleh keluarga besar dan memperoleh hak-hak dan kewajiban seperti halnya anak sah yang lainnya baik dalam hal hubungannya dengan keluarga demikian juga dalam hal warisan.

2. Sebaiknya masyarakat dapat menerima keberadaan seorang anak astra karena bagaimanapun ia adalah juga manusia biasa yang harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya juga dapat berguna didalam masyarakat. Janganlah ia hanya dipandang dari segi kedudukannya sebagai anak astra saja namun lihatlah juga bahwa dia adalah warga masyarakat . dan apabila nantinya ia diberikan hak untuk disahkan menjadi anak sah maka diharapkan agar warga masyarakat mau menerima keberadaannya sebagai anak sah dan mau menerima kenaikan kastanya tersebut karena kalau kita

lihat itu memang seharusnya menjadi haknya sejak ia dilahirkan

3. Untuk para pemuka adat dan pemuka agama hindu dalam hal ini adalah Parisada Hindu Dharma , diharapkan peranannya sebagai payung umat agar para umatnya dapat merasakan kedamaian dan keadilan dalam hidupnya. Didalam permasalahan anak astra ini peranan dari Parisada Hindu Dharma ini juga diharapkan untuk membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan seorang anak astra. Aturan yang dibuat itu haruslah dalam bentuk tertulis dan didalam aturan tersebut haruslah menyuarakan hak asasi seorang anak astra sebab ia menjadi seorang anak astra bukanlah karena kesalahannya melainkan karena kesalahan orang tuanya, untuk itulah diperlukan suatu keadilan bagi seorang anak astra baik dari segi hukum kekeluargaan dan dari segi hukum waris adat.

Setelah aturan tersebut dibuat maka merupakan kewajiban dari pengurus parisada hindu dharma tersebut untuk mensosialisasikan aturan tersebut agar aturan

tersebut dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat
Hindu Bali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Beni, I Wayan dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat di Ddalam Yurisprudensi Indonesia*", cetakan II, Surya Jaya, Denpasar, 1986.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi Tarsito, Bandung, 1984.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan II, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Kaler I Gustu Ketut, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Bali Agung, 1979.
- _____. *Cudamani Pawiwahan / Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali*, Percetakan Bali (Offset), TT.
- Korn V.E. *Hukum Kekeluargaan Adat di Bali*. Terjemahan I.G.W. Pangkat, Cetakan II, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, UNUD, 1972.
- Kertsten SUD, *Kamus Bahasa Bali*, Nusa Indah, Enoe, Flores, 1984.
- Panethje Gde, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Guna Agung, Denpasar, 1989.
- Pudja I Gede, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresaiper ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Cetakan I, CV. Junasco, Jakarta, 1977.
- Pudja G. dan Tjok Rai Sudharta, *Menawa Dharmasastra*, IX.170, Cetakan V, CV. Junasco, Jakarta, 1977/1978.
- Raka Santeri dan Ketut Wiana, "Kasta Dalam Hindu", Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993.

- Rai Sudharta, Tjok, "*Manusia Hindu Dari Kandungan Sampai Perkawinan*", Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1993.
- Satrio, J. "*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*", Cetakan I, PT Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soebakti R., *Pokok-Pokok Perdata Barat*, Cetakan XVII, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Soeripto K.R.M.H. *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, UNEJ, Jember, 1973.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Kekeluargaan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- _____, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1986.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Pusponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1958.
- Wirjo Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan IV, Sumur, Bandung, 1980.

B. Laporan Penelitian, Majalah dan Diklat

- Astiti TIP, *Tentang Unsur-Unsur Agama yang Diterima Sebagai Hukum Adat Yang Hidup di Bali*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, UNUD, Denpasar, 1983.
- Dherana Tjokroda Raka, *Persekutuan Hukum Adat dan Fungsinya Bagi Hukum Adat pada Masa Sekarang*, *Kertha Patrika*, VII – VIII, 1977.
- Sugangga, I.G.N. "*Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal*", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.

Sukerti N., *Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kertha Patrika, No. 51, Tahun XVI, 1990.

Sirtha I Nyoman, *Pilihan Hukum Dalam Pengangkatan Anak di Bali*, Kertha Patrika, No. 55, Tahun 1991.

Team Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Hukum Adat Bali (Laporan Penelitian)*, Kerjasama Fakultas Hukum UNUD Dengan BPHN Departemen Kehakiman, 1980/1981.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.